



BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Laporan Keuangan TA 2024 (Audited)

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29

Jakarta Pusat 10560

☎ (021) 4261088 (hunting)

🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,



Asnawi Abdullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	xi
LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
II. NERACA	9
III. LAPORAN OPERASIONAL	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. <i>Penjelasan Umum</i>	12
B. <i>Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran</i>	30
C. <i>Penjelasan atas Pos-pos Neraca</i>	45
D. <i>Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional</i>	91
E. <i>Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas</i>	104
F. <i>Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....</i>	113
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	2
Tabel 3 Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	3
Tabel 4 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	4
Tabel 5 Total Pagu Anggaran per-Satker Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2024 dan TA 2023	6
Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1	16
Tabel 7 Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang	21
Tabel 8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	24
Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	25
Tabel 10 Kertas Kerja Capaian Output Satker KP Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	27
Tabel 11 Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas Nasional	29
Tabel 12 Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Terakhir	30
Tabel 13 Anggaran berdasarkan Program TA 2024	30
Tabel 14 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024	31
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	32
Tabel 16 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja	38
Tabel 17 Rincian Belanja Berdasarkan Program / Kegiatan TA 2024	39
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	40
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	41
Tabel 20 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	42
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	43
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	43
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	44
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	44
Tabel 25 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	45
Tabel 26 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	46
Tabel 27 Perbandingan Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	46
Tabel 28 Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	47
Tabel 29 Perbandingan Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	48
Tabel 30 Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2024	49
Tabel 31 Mutasi Tanah	50
Tabel 32 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	52
Tabel 33 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	65

Tabel 34 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69
Tabel 35 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	71
Tabel 36 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerajaan (KDP)	74
Tabel 37 Rincian Sebaran Konstruksi Dalam Pengerajaan (KDP) per 31 Desember 2024	76
Tabel 38 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	77
Tabel 39 Mutasi Aset Tak Berwujud (ATB)	78
Tabel 40 Rincian Mutasi per Akun Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	81
Tabel 41 Saldo Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2024	81
Tabel 42 Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	82
Tabel 43 Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	84
Tabel 44 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	86
Tabel 45 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024	87
Tabel 46 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	88
Tabel 47 Perbandingan Rincian Pendapatan-LO s.d. 31 Desember 2024 dan 2023	91
Tabel 48 Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023	93
Tabel 49 Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023	95
Tabel 50 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023	96
Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023	97
Tabel 52 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023	98
Tabel 53 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 2023	99
Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	100
Tabel 55 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	101
Tabel 56 Rincian Transaksi Antar Entitas	106
Tabel 57 Transfer Masuk per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024	107
Tabel 58 Transfer Keluar per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024	107
Tabel 57 Alokasi dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting per Jenis Intervensi di Tingkat Rincian Output Tahun 2024	118
Tabel 58 Alokasi dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting per Jenis Intervensi Level Analisis Lanjutan Tahun 2024	118

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Anggaran per-Jenis Belanja TA 2024.....	38
Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Neraca Percobaan Kas	L-01
Lampiran 2	Neraca Percobaan Akrual	L-02
Lampiran 3	Neraca	L-03
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran	L-04
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	L-05
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Akun	L-06
Lampiran 7	Laporan Operasional	L-07
Lampiran 8	Laporan Perubahan Ekuitas	L-08
Lampiran 9	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca	L-09
Lampiran 10	Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel	L-10
Lampiran 11	Laporan Barang Aset Tak Berwujud	L-11
Lampiran 12	Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel)	L-12
Lampiran 13	Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud	L-13
Lampiran 14	Daftar Hak Cipta	L-14
Lampiran 15	Daftar Paten	L-15
Lampiran 16	Daftar Transfer Masuk	L-16
Lampiran 17	Daftar Transfer Keluar	L-17
Lampiran 18	Daftar Pengesahan Hibah	L-18
Lampiran 19	Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	L-19
Lampiran 20	Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/09/2024 tentang UAPPA/B-E1 Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan TA 2024	L-20

DAFTAR SINGKATAN

AA	: <i>Automatic Adjustment</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
B2P2TOOT	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
B2P2VRP	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BKPK	: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
BMN	: Barang Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
Caput	: Capaian Output
DDEL	: Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKEL	: Ditagihkan Kepada Entitas Lain
IR	: <i>Implementation Research</i>
JIJ	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan
KD	: Kantor Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KP	: Kantor Pusat
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Labkesmas	: Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Litbangkes	: Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MONSAKTI	: Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

OM SPAN	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PN	: Prioritas Nasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pusjak	: Pusat Kebijakan
RPATA	: Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RI	: Republik Indonesia
Riskesnas	: Riset Kesehatan berskala Nasional
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Satker	: Satuan Kerja
SIMAK BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SIMAN	: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPM	: Surat Perintah Membayar
SSGI	: Studi Status Gizi Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UAKPA/B	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
UAPPA/B-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1
Uker	: Unit Kerja
UP	: Uang Persediaan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,



Asnawi Abdullah

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara ringkas Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp645.889.853 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp395.846.782.365 atau mencapai 85,15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp464.908.773.000. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 1 berikut ini:



Tabel 1
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024			31 Des 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	0	645.889.853	N/A	5.806.572.429
PNBP	0	645.889.853	N/A	5.806.572.429
Belanja Negara	464.908.773.000	395.846.782.365	85,15	803.385.507.258
51 Belanja Pegawai	0	-	N/A	55.172.779.000
52 Belanja Barang	456.892.546.000	387.907.799.264	84,90	652.038.555.107
53 Belanja Modal	8.016.227.000	7.938.983.101	99,04	96.174.173.151

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp312.932.668.436 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.344.802.746; Aset Tetap (neto) sebesar Rp251.207.473.104; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp59.380.392.586. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.298.898.084 dan Rp295.633.770.352.

Tabel 2
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2024	31 Des 2023	(Rp.)	%
Aset				
Aset Lancar	2.344.802.746	16.737.732.011	(14.392.929.265)	(85,99)
Aset Tetap	251.207.473.104	770.689.021.397	(519.481.548.293)	(67,40)
Aset Lainnya	59.380.392.586	10.239.241.598	49.141.150.988	479,93
Jumlah Aset	312.932.668.436	797.665.995.006	(484.733.326.570)	(60,77)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	17.298.898.084	8.959.362.572	8.339.535.512	93,08
Ekuitas				
Ekuitas	295.633.770.352	788.706.632.434	(493.072.862.082)	(62,52)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	312.932.668.436	797.665.995.006	(484.733.326.570)	(60,77)



C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp410.216.914. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp438.407.215.447 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(437.996.998.533). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp441.673.281 sehingga entitas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami Defisit-LO sebesar Rp(437.555.325.252).

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2024	31 Des 2023	(Rp.)	%
Pendapatan				
PNBP	410.216.914	4.038.609.585	(3.628.392.671)	(89,84)
Jumlah Pendapatan	410.216.914	4.038.609.585	(3.628.392.671)	(89,84)
Beban				
Beban Operasional	438.407.215.447	910.316.390.612	(471.909.175.165)	(51,84)
Jumlah Beban	438.407.215.447	910.316.390.612	(471.909.175.165)	(51,84)
Defisit Kegiatan Operasional	(437.996.998.533)	(906.277.781.027)	468.280.782.494	(51,67)
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	441.673.281	(11.952.919.204)	12.394.592.485	(103,70)
Defisit-LO	(437.555.325.252)	(918.230.700.231)	480.675.374.979	(52,35)

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp788.706.632.434 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(437.555.325.252); kemudian dikurangi Koreksi yang



menambah nilai ekuitas sebesar Rp642.827.987; kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(56.160.364.817) sehingga Ekuitas entitas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp295.633.770.352.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2024	31 Des 2023	(Rp.)	%
Ekuitas Awal	788.706.632.434	1.075.294.180.652	(286.587.548.218)	(26,65)
Defisit LO	(437.555.325.252)	(918.230.700.231)	480.675.374.979	(52,35)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	642.827.987	(5.586.059.332)	6.228.887.319	(111,51)
Transaksi Antar Entitas	(56.160.364.817)	637.229.211.345	(693.389.576.162)	(108,81)
Ekuitas Akhir	295.633.770.352	788.706.632.434	(493.072.862.082)	(62,52)

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



Informasi penting terkait pelaksanaan anggaran:

- a. Jumlah Satker Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2024 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 1 (satu) Satker yaitu DIPA Kantor Pusat BKKBN dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp464.908.773.000 untuk pelaksanaan anggaran pada 5 (lima) unit kerja antara lain:
 - 1) Sekretariat Badan;
 - 2) Pusjak Upaya Kesehatan (Pusjak UK);
 - 3) Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKKSDK);
 - 4) Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK); dan
 - 5) Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGK).

Sepanjang tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran semula Rp462.942.252.000 menjadi Rp464.908.773.000 di Kantor Pusat BKKBN. Kenaikan sebesar Rp1.966.521.000 merupakan revisi DIPA penambahan anggaran yang bersumber dana hibah dari World Health Organization (WHO) terdapat pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sesuai dengan Biennium WHO-Kementerian Kesehatan 2024-2025 dengan nomor register hibah 22ZGN5FA.

- b. Satker B2P2TOOT Tawangmangu tidak memperoleh DIPA tahun 2024 karena telah dilakukan pengintegrasian tugas, fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran terkait pelayanan ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Proses likuidasi entitas akuntansi B2P2TOOT Tawangmangu telah dilaksanakan pada periode Agustus 2023.
- c. Satker B2P2VRP Salatiga tidak memperoleh DIPA tahun 2024 karena telah berubah fungsi organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Proses likuidasi entitas akuntansi B2P2VRP Salatiga telah dilaksanakan pada periode Januari 2024.

- d. Satker Balai/Loka Litbangkes lainnya tidak memperoleh DIPA tahun 2024 karena telah berubah fungsi organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Proses likuidasi entitas akuntansi Balai/Loka Litbangkes telah dilaksanakan pada periode Januari-Maret 2024.

Berikut ini total pagu anggaran di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan:

Tabel 5

Total Pagu Anggaran per-Satker Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2024 dan TA 2023

No.	Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023	%
1	Kantor Pusat BKPK	464.908.773.000	681.939.947.000	(46,68)
	Jumlah Anggaran KP (5 Uker)	464.908.773.000	681.939.947.000	(46,68)
1	B2P2 TOOT Tawangmangu	-	15.587.145.000	N/A
2	B2P2 VRP Salatiga	-	22.820.048.000	N/A
3	Balai Litbangkes Magelang	-	22.711.352.000	N/A
4	Balai Litbangkes Donggala	-	9.030.985.000	N/A
5	Balai Litbangkes Banjarnegara	-	10.583.121.000	N/A
6	Balai Litbangkes Tanah Bumbu	-	8.436.143.000	N/A
7	Balai Litbangkes Papua	-	14.141.923.000	N/A
8	Balai Litbangkes Baturaja	-	11.582.589.000	N/A
9	Balai Litbangkes Aceh	-	9.527.610.000	N/A
10	Loka Litbangkes Pangandaran	-	9.175.108.000	N/A
11	Loka Litbangkes Waikabubak	-	22.274.111.000	N/A
	Jumlah Anggaran 11 KD	-	155.870.135.000	N/A
	Jumlah	464.908.773.000	837.810.082.000	(80,21)

Informasi penting terkait penyusunan Laporan Keuangan TA 2024:

- Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang menggunakan aplikasi SAKTI;
- Unit Akuntansi tingkat Eselon 1. pembentukannya menjadi tanggung jawab yang melekat bagi Pejabat Eselon 1 terkait untuk setiap tahun anggaran menetapkan Unit Akuntansi Pembantu



Pengguna Anggaran/Barang-Eselon 1 (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan tingkat Eselon 1 dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal.
- d. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN) melalui aplikasi MONSAKTI.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	B.1	-	645.889.853	N/A	1.920.905.000	5.806.572.429	302,28
JUMLAH PENDAPATAN		-	645.889.853	N/A	1.920.905.000	5.806.572.429	302,28
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	-	-	N/A	56.042.391.000	55.172.779.000	98,45
Belanja Barang	B.4	456.892.546.000	387.907.799.264	84,90	682.833.440.000	652.038.555.107	95,49
Belanja Modal	B.5	8.016.227.000	7.938.983.101	99,04	98.934.251.000	96.174.173.151	97,21
JUMLAH BELANJA		464.908.773.000	395.846.782.365	85,15	837.810.082.000	803.385.507.258	95,89



II. NERACA

**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2024	31 DES 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	793.600.400	-
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.1.2	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.3	-	10.079.242
Persediaan	C.1.4	340.661.704	71.625.424
Jumlah Aset Lancar	C.1.5	1.210.540.642	16.656.027.345
		2.344.802.746	16.737.732.011
ASET TETAP			
Tanah	C.2	79.836.993.000	151.693.237.600
Peralatan dan Mesin	C.2.1	266.906.137.616	716.591.283.227
Gedung dan Bangunan	C.2.2	194.998.359.440	461.039.419.392
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.3	2.759.050.695	15.062.080.161
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	4.842.292.125	7.361.968.466
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	-	14.539.638.284
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(298.135.359.772)	(595.598.605.733)
Jumlah Aset Tetap	C.2.7	251.207.473.104	770.689.021.397
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.3	1.868.216.251	5.152.427.417
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.3.1	59.173.642.012	9.796.077.610
Aset Lain-Lain	C.3.2	15.188.658.214	14.043.875.798
Akum. Penystrn dan Amortisasi Aset Lainn	C.3.3	(16.850.123.891)	(18.753.139.227)
Jumlah Aset Lainnya	C.3.4	59.380.392.586	10.239.241.598
JUMLAH ASET		312.932.668.436	797.665.995.006
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4	17.298.898.084	8.959.362.572
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.4.1	17.298.898.084	8.959.362.572
JUMLAH KEWAJIBAN		17.298.898.084	8.959.362.572
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	295.633.770.352	788.706.632.434
JUMLAH EKUITAS	C.5.1	295.633.770.352	788.706.632.434
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		312.932.668.436	797.665.995.006



III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DES 2024	31 DES 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	410.216.914	4.038.609.585
JUMLAH PENDAPATAN		410.216.914	4.038.609.585
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	55.178.270.462
Beban Persediaan	D.3	2.636.654.338	67.037.695.959
Beban Barang dan Jasa	D.4	292.891.114.619	327.321.384.908
Beban Pemeliharaan	D.5	8.909.796.354	32.213.633.764
Beban Perjalanan Dinas	D.6	100.877.959.209	335.622.538.660
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	10.831.021.617	24.843.720.677
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	22.260.669.310	68.099.146.182
JUMLAH BEBAN		438.407.215.447	910.316.390.612
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(437.996.998.533)	(906.277.781.027)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset		230.867.520	(4.547.859.487)
Pendapatan Pelepasan Aset		232.132.520	269.795.007
Beban Pelepasan Aset		1.265.000	4.817.654.494
Surplus (Defisit) Keg. Non Operasional Lainnya		210.805.761	(7.405.059.717)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		210.805.761	6.418.512.849
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	13.823.572.566
SURPLUS /DEFISIT DARI KEG NON OPERASIONAL	D.10	441.673.281	(11.952.919.204)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(437.555.325.252)	(918.230.700.231)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(437.555.325.252)	(918.230.700.231)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2024	31 DES 203
EKUITAS AWAL	E.1	788.706.632.434	1.075.294.180.652
<i>SURPLUS/DEFISIT LO</i>	E.2	(437.555.325.252)	(918.230.700.231)
<i>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</i>		642.827.987	(5.586.059.332)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3	-	(14.930.000)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4	642.827.987	(5.571.129.332)
<i>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</i>	E.5	(56.160.364.817)	637.229.211.345
<i>KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS</i>		(493.072.862.082)	(286.587.548.218)
EKUITAS AKHIR	E.6	295.633.770.352	788.706.632.434



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa



Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan keuangan Kementerian Kesehatan;



19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
23. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3/PB/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Unaudited*).

*Profil dan
Kebijakan
Strategis*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan Kementerian/ Lembaga sehingga pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Badan Penelitian dan Pengembangan



Kesehatan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
3. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari modul GLP, modul aset dan modul Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi



Anggaran. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan. aset tetap. dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tersaji sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Nama Satker/ Unit Kerja	Satker DIPA	Kewenangan		Jumlah Satker
			KP	KD	
1	Kantor Pusat BKPK	1	1		1
a	Sekretariat Badan				
b	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan				
c	Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
d	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan				
e	Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan				
Jumlah		1	1	0	1

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang



diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).



- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan



pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis



belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh



tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;



- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai



dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dihadwakan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi



penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.5/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 9
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise. Peta RBI Skala Besar. Peta LPI Skala Besar. Peta Batas Wilayah Administrasi. Citra Satelit Resolusi Tinggi. Foto Udara. Peta Tematik Morfometri. Peta Tematik Penutup Lahan. Peta Tematik Sistem Lahan. Peta Tematik Lainnya	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Peta RBI Skala Menengah. Peta Batas Wilayah Administrasi. Peta Batas Negara. Data Pengukuran Sifat Dasar Teliti. Citra Satelit Resolusi Sedang. Atlas Peta LLN Skala Menengah. Peta LPI Skala Menengah	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. Peta LLN Skala Kecil. Peta LPI Skala Kecil. Data Pasang Surut. Data GNSS. Data Gaya berat	12
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	20
	25



Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produsen Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat



pertama kali transaksi berlangsung yang kemudian disesuaikan apabila ada pemenuhan kewajiban,p baik sebagian maupun keseluruhan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian

Output Satker

A.6. Capaian Output Satker

Sampai dengan periode 31 Desember 2024 kertas kerja capaian output pada satker Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Kertas Kerja Capaian Output Satker KP Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

No	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk
				Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	
1	KANTOR PUSAT BKPK	14	90	90	0	90	100

Sumber: Aplikasi OMSPAN-MONEVPA



A.7. Capaian Output Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional III - Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. melalui kegiatan prioritas yang terdapat pada Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang tersebar di dua unit kerja dengan pagu mencapai Rp240.295.522.000 dan realisasi sebesar Rp195.419.790.285.

Rincian kertas kerja capaian output di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:



Tabel 11
Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas Nasional
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

No	Satker	Unit Pelaksana	RO	Anggaran			Output		
				Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian (%)	Satuan
1	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (LP-4)	214.997.291.000	180.857.501.132	84,12%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
2	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 Melalui Uji Klinik Vaksin Merah Putih (Inavac) (RF-14)	21.201.337.000	11.051.402.478	52,13%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
3	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK-18)	1.985.464.000	1.864.634.469	93,91%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
4	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan National Health Account (NHA) (PK-17)	186.810.000	111.899.328	59,90%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
5	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Utilization Review dalam Pengendalian Kuratif dalam JKN (PK-18)	700.680.000	595.720.804	85,02%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
6	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19)	558.508.000	409.089.405	73,25%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
7	Kantor Pusat BKPK	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	665.432.000	529.542.669	79,58%	1	100%	Rekomendasi Kebijakan
Kegiatan Prioritas Nasional				240.295.522.000	195.419.790.285	81,32%			



B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Terakhir

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Estimasi Pendapatan	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	454.091.842.000	456.892.546.000
Belanja Modal	8.850.410.000	8.016.227.000
Jumlah Belanja	462.942.252.000	464.908.773.000

Sepanjang tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran semula Rp462.942.252.000 menjadi Rp464.908.773.000 di Kantor Pusat BKPK. Kenaikan sebesar Rp1.966.521.000 merupakan revisi DIPA penambahan anggaran yang bersumber dana hibah dari World Health Organization (WHO) terdapat pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sesuai dengan Biennium WHO-Kementerian Kesehatan 2024-2025 dengan nomor register hibah 22ZGN5FA.

Berdasarkan jenis kegiatannya, pagu anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13
Anggaran berdasarkan Program TA 2024

PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (DG)	17.000.082.000	22.234.721.000
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan (DS)	364.136.251.000	359.197.143.000
Program Dukungan Manajemen (WA)	81.805.919.000	83.476.909.000
Total Belanja	462.942.252.000	464.908.773.000



Realisasi
Pendapatan
Rp645.889.853

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp645.889.853 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Pendapatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terdiri dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha; Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi; Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan; Pendapatan Denda; dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2024		
		Estimasi	Realisasi	% Real Est.
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	-	236.206.020	N/A
2	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		11.315.142	N/A
3	Pendapatan Denda	-	125.791.992	N/A
4	Pendapatan Lain-lain	-	272.576.699	N/A
	Jumlah	-	645.889.853	N/A

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 88,88 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan secara signifikan terjadi pada akun Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi serta akun Pendapatan bunga.

Meskipun secara umum pendapatan mengalami penurunan, masih terdapat kenaikan signifikan pada pendapatan denda.

Rincian kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan



per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada rincian berikut ini.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	236.206.020	376.282.311	(37,23)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	-	124.920.000	(100,00)
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	-	1.779.950.985	(100,00)
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan	11.315.142	1.321.499.364	(99,14)
Pendapatan Denda	125.791.992	618.576.508	(79,66)
Pendapatan Lain-lain	272.576.699	1.585.343.261	(82,81)
Jumlah	645.889.853	5.806.572.429	(88,88)

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp236.206.020 terdapat pada Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp4.073.500 merupakan penyetoran atas pemusnahan arsip tahun 2013 sebanyak 3.612 berkas. Pendapatan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 26 Juli 2024 sesuai dengan bukti setor NTB 482068837369 dan NTPN 0985D3CIFKDM72DR.
 - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp179.352.520 berupa;
 - 1) Penjualan satu unit mobil Mitsubishi L300 Nopol B7572PPA senilai Rp65.000.000 sesuai risalah lelang nomor 762/08.03/2024-01



tanggal 23 April 2024. Atas hasil penjualan tersebut seluruhnya telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 24 April 2024 sesuai bukti setor dengan NTB 000000701975 dan NTPN 5BE2048VVEN3GUP4;

- 2) Penjualan satu paket inventaris kantor senilai Rp93.348.500 sesuai risalah lelang nomor 1217/08.03/2024-01 tanggal 11 Juni 2024. Atas hasil penjualan tersebut, seluruhnya telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 20 Juni 2024 sesuai dengan bukti setor dengan nomor NTB 000000678533 dan NTPN 6801D1JNFV5O7MPS;
 - 3) Penjualan satu paket inventaris kantor senilai Rp21.004.020 sesuai risalah lelang nomor 2366/08.03/2024-01 tanggal 11 September 2024. Atas hasil penjualan tersebut, seluruhnya telah disetor ke kas negara pada tanggal 13 September 2024 sesuai dengan bukti setor dengan NTB 036192741936 dan NTPN 36C4E61QV4AEGTJT7.
- c. Pendapatan dari Pemindah tangangan BMN Lainnya sebesar Rp52.780.000 berupa penjualan satu paket inventaris kantor sesuai risalah lelang nomor 363/08.03/2024-01 tanggal 29 Februari 2024. Atas hasil penjualan tersebut, seluruhnya telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan bukti setor dengan nomor NTB 000000336177 dan NTPN DAF402G4VPCFTK5T.

2. Pendapatan bunga, pengelolaan rekening dan



pengelolaan keuangan berupa pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) senilai Rp11.315.142 terdapat pada Kantor Pusat BKKBN merupakan pendapatan jasa giro atas pengelolaan rekening lainnya RPL 140 PDHL BKKBN WHO1 sebagai penampung dana hibah dalam bentuk uang dari WHO pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dengan nomor register 22ZGN5FA. Rincian setoran pendapatan jasa giro disajikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan berupa jasa giro senilai Rp1.124.808 yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Agustus 2024 sesuai dengan bukti setor dengan NTB 802844459667 dan NTPN 3A3EA61QV47L96MO.
- b. Pendapatan berupa jasa giro senilai Rp674.837 yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai dengan bukti setor dengan NTB 156155804038 dan NTPN 01F7155DF9LIR0HR.
- c. Pendapatan berupa jasa giro senilai Rp3.408.515 yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 27 September 2024 sesuai dengan bukti setor dengan NTB 156155804038 dan NTPN 01F7155DF9LIR0HR.
- d. Pendapatan berupa jasa giro senilai Rp3.155.878 yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 29 Oktober 2024 sesuai dengan bukti setor dengan NTB 004922800148 dan NTPN B40012G4VQ4AI7GG.
- e. Pendapatan berupa jasa giro senilai Rp2.951.104



yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 28 November 2024 sesuai dengan bukti setor dengan NTB: 837808300232 dan NTPN E4CBE55DF9UCIOG1.

3. Pendapatan Denda berasal dari akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp125.791.992 terdapat pada Loka Litbangkes Waikabubak, dengan perincian:
 - a. Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp3.580.000 atas pengadaan meubelair sesuai SPM RPATA Nomor 00001T/653589/2024 dan SP2D Nomor 249991303000567 tanggal 4 Januari 2024;
 - b. Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp122.211.992 atas jasa konstruksi lanjutan pembangunan gedung dan bangunan Laboratorium BSL-2 sesuai SPM RPATA Nomor 00002T/653589/2024 dan SP2D Nomor 249991302002202 tanggal 19 Januari 2024.
4. Pendapatan Lain-lain Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan senilai Rp272.576.699 berupa:
 - a. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp2.080.667 terdapat pada satker Balai Litbangkes Donggala berupa pengembalian uang makan pegawai sebesar Rp492.100 dan pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp1.588.567;
 - b. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp204.725.094 terdapat pada Kantor Pusat BPKP dengan perincian:



- 1) pengembalian belanja perjalanan dinas kegiatan validasi tim SKI TA 2023 SPM Nomor 00893T dengan kode kegiatan 6833.PBG.002.701.H; Akun 524111 senilai Rp123.504.300. Penerimaan kembali belanja barang TAYL tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 10 Januari 2024 sesuai bukti setor dengan NTB 000000771543 dan NTPN 97A6A48VVEDMVMEU.
- 2) pengembalian belanja perjalanan dinas kegiatan validasi tim SKI TA 2023 SPM Nomor 00895T dengan kode kegiatan 6833.PBG.002.701.H; Akun 524113 senilai Rp14.350.000. Penerimaan kembali belanja barang TAYL tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 10 Januari 2024 sesuai bukti setor dengan NTB 000000772204 dan NTPN 9199B48VVEDMVLF2.
- 3) pengembalian belanja perjalanan dinas kegiatan validasi tim SKI TA 2023 SPM Nomor 00892T dengan kode kegiatan 6833.PBG.002.701.H; Akun 524111 senilai Rp870.794. Penerimaan kembali belanja barang TAYL tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 10 Januari 2024 sesuai bukti setor dengan NTB: 000000772883 dan NTPN: 04ADC0NA0445BL1Q;
- 4) Setoran berupa tindak lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Operasional TA 2017 dan 2018 di Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat atas kelebihan biaya perjalanan dinas



kegiatan Studi Kohor dan TKA senilai Rp41.000.000 sesuai bukti setor dengan NTB 782572274510 dan NTPN ED67B6U8EU5ALKOF; dan

5) Setoran berupa tindak lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Operasional TA 2017 dan 2018 di Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat atas kelebihan biaya perjalanan dinas kegiatan Studi Kohor dan TKA senilai Rp25.000.000 sesuai bukti setor dengan NTB 996913800363 dan NTPN C185F1JNFVNIMC0Q.

c. Penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar Rp65.770.938 terdapat pada Kantor Pusat BPKP merupakan setoran tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas pengadaan *spare part robotic* kegiatan SKI Biomedis pada Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan tahun anggaran 2023 (Kode kegiatan 6833.PBG.002.701.P.532111. Telah disetor ke kas negara pada tanggal 20 Mei 2024 sesuai bukti setor dengan NTB 786978188617 dan NTPN 5F5EE2G4VPL439TI.



Realisasi Belanja

Rp395.846.782.3

65

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp395.846.782.365 atau 85,15 persen dari anggaran belanja sebesar Rp464.908.773.000.

Tabel 16
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

URAIAN	31 DESEMBER 2024		% REALISASI
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	456.892.546.000	390.314.398.837	85,43
Belanja Modal	8.016.227.000	7.938.983.101	99,04
Jumlah Bruto	464.908.773.000	398.253.381.938	85,66
Pengembalian Belanja		2.406.599.573	N/A
Jumlah Neto	464.908.773.000	395.846.782.365	85,15

Komposisi anggaran per jenis belanja. dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 1
Komposisi Anggaran per-Jenis Belanja TA 2024



Komposisi anggaran dan realisasi per jenis belanja. dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik 2
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Belanja Berdasarkan Program / Kegiatan TA 2024

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI NETO
DG - PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN		
Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	22.234.721.000	20.589.736.475
Sub Total	22.234.721.000	20.589.736.475
DS - PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESIHATAN		
Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	257.328.168.000	203.486.112.163
Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	15.300.812.000	12.580.814.897
Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	9.104.707.000	8.225.023.326
Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	60.930.280.000	54.637.596.799
Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	16.533.176.000	15.484.328.866
Sub Total	359.197.143.000	294.413.876.051
WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	83.476.909.000	80.843.169.839
Sub Total	83.476.909.000	80.843.169.839
Total	464.908.773.000	395.846.782.365

Dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya, realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 menurun sebesar 50,73 persen. Realisasi Belanja



sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp395.846.782.365 dan Rp803.385.507.258. Penurunan realisasi terjadi pada semua jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja disajikan sebagai berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI NETO 31 DES 2024	REALISASI NETO 31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	55.172.779.000	(100,00)
Belanja Barang	387.907.799.264	652.038.555.107	(40,51)
Belanja Modal	7.938.983.101	96.174.173.151	(91,75)
Jumlah	395.846.782.365	803.385.507.258	(50,73)

Belanja Pegawai

Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp55.172.779.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Tabel 19
Perbandingan Realisasi Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	28.094.516.459	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	228.018.700	(100,00)
Belanja Lembur	-	146.644.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus/Kinerja	-	26.832.190.338	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	55.301.369.497	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(128.590.497)	(100,00)
Jumlah Belanja	0	55.172.779.000	(100,00)

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan 31 Desember 2023, hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perpindahan status pegawai satker daerah di lingkungan BKKBN seiring perubahan fungsi organisasi dan tata kerja pada Balai Besar/Balai/Loka Litbangkes yang bertransformasi menjadi Balai Besar/Balai/Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat dibawah Unit Utama Ditjen Kesehatan Masyarakat.
2. Pembayaran belanja pegawai untuk Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dibayarkan melalui DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Belanja Barang

Rp387.907.799.2

64

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp387.907.799.264 dan Rp652.038.555.107.



Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 40,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komponen belanja barang yang mengalami penurunan realisasi signifikan antara lain belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dalam negeri dan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Tabel 20
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	22.662.823.393	52.260.166.505	(56,63)
Belanja Barang Non Operasional	33.383.903.515	136.964.207.653	(75,63)
Belanja Barang Persediaan	3.235.925.536	38.907.269.910	(91,68)
Belanja Jasa	209.001.133.629	34.289.216.728	509,52
Belanja Pemeliharaan	7.905.662.637	32.985.193.576	(76,03)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	90.662.842.632	330.244.645.655	(72,55)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	11.810.503.495	7.842.266.996	50,60
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	101.265.220	100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.651.604.000	21.426.574.000	(45,62)
Jumlah Belanja Kotor	390.314.398.837	655.020.806.243	(40,41)
Pengembalian Belanja	(2.406.599.573)	(2.982.251.136)	(19,30)
Jumlah Belanja	387.907.799.264	652.038.555.107	(40,51)

*Belanja Modal Rp
7.938.983.101*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.938.983.101 dan Rp96.174.173.151. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset



Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 91,75 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.799.659.773	89.546.654.010	(93,52)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.091.830.868	6.557.395.111	(68,10)
Belanja Modal Lainnya	47.492.460	70.124.030	N/A
Jumlah Belanja Kotor	7.938.983.101	96.174.173.151	(91,75)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	7.938.983.101	96.174.173.151	(91,75)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.799.659.773 mengalami penurunan sebesar 93,52 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 sebesar Rp89.546.654.010.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.799.659.773	89.546.654.010	(93,52)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	-	-	N/A
Jumlah Belanja Kotor	5.799.659.773	89.546.654.010	(93,52)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	5.799.659.773	89.546.654.010	(93,52)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai



dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.091.830.868 dan Rp6.557.395.111. Terdapat penurunan sebesar 68,10 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2024	31 DES 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	6.365.999.753	(100,00)
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	191.395.358	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.091.830.868	-	N/A
Jumlah Belanja Kotor	2.091.830.868	6.557.395.111	(68,10)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	N/A
Jumlah Belanja	2.091.830.868	6.557.395.111	(68,10)

Belanja penambahan nilai Gedung dan bangunan senilai Rp2.091.830.868 tersebut merupakan transaksi perolehan/penambahan kontruksi dalam pengerjaan (KDP) berupa pembangunan/renovasi gedung C ex P2P.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp47.492.460 dan Rp70.124.030. Terdapat penurunan sebesar 32,27 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2024	31 DES 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	47.492.460	70.124.030	(32,27)
Jumlah Belanja Kotor	47.492.460	70.124.030	(32,27)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	N/A
Jumlah Belanja	47.492.460	70.124.030	(32,27)



C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar

Rp2.344.802.74

6

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.344.802.746 dan Rp16.737.732.011. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

KETERANGAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp793.600.400

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp793.600.400 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.



Tabel 26
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

KETERANGAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	793.600.400	-
Jumlah	793.600.400	-

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp793.600.400 saldo dana hibah dalam bentuk uang yang telah disetor ke rekening bendahara pengeluaran (RPL 140 PDHL BKPK WHO1) dari donor World Health Organization (WHO) untuk dukungan kegiatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sesuai dengan Biennium WHO-Kementerian Kesehatan 2024-2025 dan nomor register hibah 22ZGN5FA.

*Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0*

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp10.079.242.

Tabel 27
Perbandingan Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 DES 2024	31 DES 2023
Belanja Barang Dibayar Dimuka		
Pembayaran lisensi aplikasi rapat virtual	-	2.110.652
Pembayaran lisensi aplikasi IT (Hosting)	-	703.000
Pembayaran lisensi aplikasi fingerspot	-	2.860.000
Pembayaran pengelolaan limbah B3	-	4.405.590
Jumlah	-	10.079.242



Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp340.661.704

C.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp340.661.704 dan Rp71.625.424. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah yang belum diterima pembayarannya. dan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/ atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

KETERANGAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Pendapatan yang masih harus diterima atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah	340.661.704	71.625.424
Jumlah	340.661.704	71.625.424

Saldo Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 sebesar Rp340.661.704 terdapat pada Kantor Pusat BPKP merupakan pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah atas pekerjaan pelaksanaan kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 sesuai Berita Acara Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan nomor BJ.01.03/H.VI.2a/2946/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Persediaan
Rp1.210.540.642

C.1.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar



Rp1.210.540.642 dan Rp16.656.027.345.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 29
Perbandingan Saldo Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

JENIS	31 DES 2024	31 DES 2023
Barang Konsumsi	1.078.713.242	14.685.897.272
Bahan untuk Pemeliharaan	127.176.500	350.599.610
Persediaan Lainnya	4.650.900	1.619.530.463
Jumlah	1.210.540.642	16.656.027.345

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp1.078.713.242 terdapat pada Kantor Pusat BKKPK antara lain terdiri dari alat tulis kantor, tinta printer, perlengkapan listrik, bahan penunjang kantor lainnya, dan alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
2. Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp127.176.500 terdapat pada Kantor Pusat BKKPK antara lain terdiri dari peralatan kebersihan, bahan kimia untuk pembersih, kunci kran, pengharum ruangan dan perabot kantor lainnya.
3. Persediaan Lainnya sebesar Rp4.650.900 terdapat pada Kantor Pusat BKKPK antara lain terdiri dari obat cair, obat padat, obat serbuk, dan obat gel untuk persediaan poliklinik.



Tabel 30
Mutasi Persediaan
Per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	16.656.027.345
Mutasi tambah:		
Pembelian		3.235.925.536
Reklasifikasi Masuk		5.009.985
Mutasi kurang:		
Habis Pakai		(3.640.788.055)
Reklasifikasi Keluar		(5.009.985)
Transfer Keluar		(7.272.857.792)
Transfer Keluar Likuidasi		(7.767.766.392)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.210.540.642

Aset Tetap

Rp251.207.473.104

C.2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp251.207.473.104 dan Rp770.689.021.397.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Tanah

Rp79.836.993.000

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp79.836.993.000 dan Rp151.693.237.600.

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



Tabel 31
Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp 151.693.237.600
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar Likuidasi	Rp (71.856.244.600)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 79.836.993.000

Mutasi kurang aset tanah merupakan transaksi transfer keluar likuidasi senilai Rp71.856.244.600 terdapat pada satker:

1. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset 2 bidang tanah senilai Rp6.041.700.000 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
2. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset 1 bidang tanah seluas 5.000m² senilai Rp20.610.000.000 kepada Balai Labkesmas Papua sesuai BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.
3. Balai Litbangkes Banjarnegara: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah senilai Rp5.661.461.600 kepada Balai Labkesmas Banjarnegara sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/H.XI/53/2024 tanggal 15 Januari 2024.
4. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah senilai Rp824.762.000 kepada Balai Labkesmas Donggala sesuai BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.
5. Balai Litbangkes Tanahbumbu: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah senilai Rp5.879.663.000



kepada Loka Labkesmas Tanahbumbu sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.4/87/2024 tanggal 15 Januari 2024.

6. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah dengan luas 4.166m² senilai Rp1.639.450.000 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai dengan BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
7. Balai Litbangkes Baturaja: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah senilai Rp14.959.921.000 kepada Loka Labkesmas Baturaja sesuai BAST Nomor KN.01.07/H.XVI/191/2024 tanggal 21 Maret 2024.
8. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah senilai Rp9.026.787.000 kepada Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.
9. Loka Litbangkes Waikabubak: transaksi transfer keluar likuidasi aset tanah senilai Rp7.212.500.000 kepada Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/1/52/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Peralatan dan

Mesin

Rp266.906.137.6

16

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp266.906.137.616 dan Rp716.591.283.227.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan



kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	716.591.283.227
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.689.161.773
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	1.833.566.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	5.498.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp	69.832.000
Transfer Masuk	Rp	820.349.130
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	(174.960.660.131)
Transfer Keluar Likuidasi	Rp	(271.066.303.861)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(8.857.650.004)
Koreksi Pencatatan		(4.153.167.580)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(65.770.938)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	266.906.137.616
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	(236.485.993.604)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	30.420.144.012

Mutasi tambah peralatan dan mesin berasal dari transaksi antara lain:

1. Pembelian sebesar Rp6.689.161.773 pada satker:
 - a. Kantor Pusat BKKBN dengan pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp5.794.161.773 terdapat pada unit kerja:
 - 1) Sekretariat Badan dengan nilai total pembelian sebesar Rp4.878.861.773 berupa:
 - A.C. Cassete sebanyak 15 buah senilai Rp517.700.000;
 - A.C. Split sebanyak 4 buah senilai Rp34.500.000;



- Alat Penghancur Kertas sebanyak 1 buah senilai Rp5.700.000;
- *All Band Transceiver* sebanyak 4 unit senilai Rp82.000.000;
- *Antena All Band* sebanyak 2 buah senilai Rp8.500.000;
- *Audio Amplifier* sebanyak 1 buah senilai Rp14.300.000;
- *Battery Charger* (Peralatan Studio Audio) sebanyak 1 buah senilai Rp35.500.000;
- *Bracket Standing* Peralatan sebanyak 3 buah senilai Rp4.760.000;
- *Camera Conference* sebanyak 1 buah senilai Rp136.251.836;
- CCTV sebanyak 2 buah senilai Rp117.105.000;
- Dispenser sebanyak 9 buah senilai Rp26.750.000;
- External/ Portable Hardisk sebanyak 7 buah senilai Rp15.200.000;
- Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 1 buah senilai Rp4.950.000;
- Kursi Besi/Metal sebanyak 8 buah senilai Rp32.499.000;
- Kursi Fiber Glas/Plastik sebanyak 107 buah senilai Rp247.233.294;
- Laptop sebanyak 17 buah senilai Rp364.050.000;
- LCD Monitor sebanyak 1 buah senilai



Rp17.740.000;

- LCD Projector/Infocus sebanyak 3 buah senilai Rp91.500.000;
- Lemari Besi/Metal sebanyak 1 buah senilai Rp25.000.000;
- Lemari Es sebanyak 3 buah senilai Rp8.850.000;
- Lori Dorong sebanyak 3 unit senilai Rp7.300.000;
- Loundspeaker sebanyak 5 buah senilai Rp57.203.904;
- Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 3 buah senilai Rp23.216.000;
- Meja Kerja Kayu sebanyak 10 buah senilai Rp63.094.000;
- Meja Makan Besi sebanyak 1 buah senilai Rp8.082.000;
- Meja Rapat sebanyak 3 buah senilai Rp81.244.000;
- Meja Ruang Tamu sebanyak 2 buah senilai Rp8.646.000;
- *Microphone Table Stand* sebanyak 8 buah senilai Rp280.750.000;
- *Microphone/ Wireless MIC* sebanyak 1 buah senilai Rp16.700.000;
- Mini Komputer sebanyak 1 buah senilai Rp9.850.000;
- Mixer Sound Sistem sebanyak 1 unit senilai Rp4.900.000;
- Peralatan Fitnes sebanyak 25 buah senilai Rp416.020.000;



- Printer sebanyak 13 buah senilai Rp89.617.500;
 - Rak Besi sebanyak 10 buah senilai Rp21.350.000;
 - Rak Peralatan sebanyak 1 buah senilai Rp7.100.000;
 - Scanner sebanyak 10 buah senilai Rp100.280.000;
 - Sice sebanyak 58 buah senilai Rp212.658.057;
 - Sound System sebanyak 2 buah senilai Rp247.713.000;
 - Tablet PC sebanyak 9 buah senilai Rp81.770.000;
 - Teleprompter sebanyak 1 buah senilai Rp14.350.000;
 - Televisi sebanyak 8 buah senilai Rp132.865.182;
 - Tempat Menyimpan Gambar sebanyak 1 buah senilai Rp17.500.000;
 - Video Monitor sebanyak 2 buah senilai Rp752.000.000;
 - Video Wall sebanyak 1 unit senilai Rp270.000.000;
 - Voice Recorder sebanyak 1 buah senilai Rp2.000.000; dan
 - Workstation sebanyak 9 buah senilai Rp162.563.000.
- 2) Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dengan nilai pembelian senilai



Rp85.950.000 berupa:

- Lap Top sebanyak 3 buah senilai Rp67.350.000;
- Tablet PC sebanyak 1 buah senilai Rp18.600.000.

3) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dengan pembelian senilai Rp139.600.000 berupa:

- Laptop sebanyak 5 buah senilai Rp115.500.000;
- Printer sebanyak 3 buah senilai Rp6.600.000;
- *Camera Conference* sebanyak 1 buah senilai Rp17.500.000.

4) Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dengan nilai pembelian senilai Rp298.850.000 berupa:

- Lap Top sebanyak 10 buah senilai Rp205.000.000;
- P.C Unit sebanyak 1 buah senilai Rp44.800.000;
- Scanner sebanyak 2 buah senilai Rp22.000.000;
- *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 1 buah senilai Rp2.050.000;
- *Tablet PC* sebanyak 1 buah senilai Rp25.000.000.

5) Pusat Kebijakan Global dan Teknologi



Kesehatan dengan nilai pembelian senilai Rp390.900.000 berupa:

- Alat penghancur kertas sebanyak 2 buah senilai Rp10.000.000;
- External/ Portable Hardisk sebanyak 1 buah senilai Rp2.210.000;
- Lap Top sebanyak 15 buah senilai Rp308.190.000;
- Lemari besi/metal sebanyak 4 buah senilai Rp16.200.000;
- Pintu elektrik sebanyak 2 buah senilai Rp5.200.000;
- Printer sebanyak 5 buah senilai Rp29.100.000; dan
- Scanner sebanyak 5 buah senilai Rp22.000.000.

- b. Loka Litbangkes Waikabubak dengan pembelian peralatan dan mesin berupa meubelair sebesar Rp895.000.000 merupakan transaksi pengadaan tahun 2023 yang selesai di Januari 2024 menggunakan mekanisme pembayaran RPATA.

Catatan:

Terdapat selisih antara nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin (LRA Belanja) per 31 Desember 2024 dengan nilai mutasi tambah pembelian peralatan dan mesin. Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada LRA Belanja sebesar Rp5.799.659.773 sedangkan nilai mutasi tambah berupa tansaksi pembelian peralatan dan mesin intrakomtable sebesar Rp6.689.161.773 sehingga



terdapat selisih Rp(889.502.000). Selisih tersebut terdapat pada Satker:

- Loka Litbangkes Waikabubak: pada bulan Januari 2024 terdapat pencatatan transaksi mutasi tambah pembelian berupa meubelair yang diperoleh menggunakan transaksi RPATA tahun 2023 sebesar Rp895.000.000.
 - Kantor Pusat BKKBN: terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada LRA Belanja yang dicatat di Aplikasi SAKTI Modul Aset sebagai transaksi pengembangan nilai aset langsung berupa pembelian *stylus pen* untuk tablet PC dengan nilai Rp(5.498.000).
2. Koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp1.833.566.000 atas aset *Automatic Laboratory Steam Generator* pada Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
 3. Pengembangan nilai aset bertambah sebesar Rp5.498.000 berupa pembelian 2 buah *stylus pen* untuk *Tablet PC* di Sekretariat Badan.
 4. Penggunaan kembali BMN yang dihentikan sebesar Rp69.832.000 terdapat pada unit kerja:
 - a. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan berupa 2 buah Note Book senilai Rp29.182.000; dan
 - b. Pusat Kebijakan Global dan Teknologi Kesehatan berupa 15 buah alat pemadam kebakaran senilai Rp40.650.000.
 5. Transfer Masuk sebesar Rp820.349.130 terdapat pada unit kerja:



- a. Sekretariat Badan senilai Rp571.649.130 yang berasal dari satker pengirim Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berupa:
 - 1) satu unit EKG monitor senilai Rp115.500.000;
 - 2) satu unit Hematology Analyzer senilai Rp264.601.470;
 - 3) satu unit Chemistry Analyzer senilai Rp160.607.660;
 - 4) satu unit PC Unit senilai Rp15.000.000;
 - 5) satu unit Printer senilai Rp1.640.000; dan
 - 6) satu unit PC Unit senilai Rp14.300.000.sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/C.I/9327/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- b. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan senilai Rp248.700.000 berupa Mini Bus dari satker pengirim Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor KN.02.04/B.IX.2/7338/2024 tanggal 2 September 2024.

Mutasi kurang nilai peralatan dan mesin adalah:

1. Transfer keluar peralatan dan mesin sebesar Rp174.960.660.131 dengan perincian:
 - a. Kantor Pusat BKPK (unit kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) melakukan transfer keluar sebesar Rp171.323.060.601 kepada Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.
 - b. Kantor Pusat BKPK melakukan transfer keluar



senilai Rp42.267.800 kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan perincian:

- 1) Sekretariat Badan melakukan transfer keluar berupa Laptop HP Spectre senilai Rp28.300.000 kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (unit kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) sesuai BAST Nomor KN.01.05/H.I/7502/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- 2) Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan melakukan transfer keluar berupa laptop senilai Rp13.967.800 kepada Direktorat Kesehatan Jiwa sesuai BAST Nomor KN.02.04/H.II/1578/2024 tanggal 14 Mei Tahun 2024;
- c. Kantor Pusat BKPK (unit kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) melakukan transfer keluar kepada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara berupa *Centrifuge* senilai Rp18.364.500 sesuai BAST Nomor KN.01.02/H.III/6827/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- d. Kantor Pusat BKPK (unit kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) melakukan transfer keluar kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta berupa alat laboratorium senilai Rp213.153.000 sesuai



BAST Nomor KN.01.02/H.III/7196/2024
tanggal 18 November 2024.

- e. Kantor Pusat BPKP (unit kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) melakukan transfer keluar kepada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh berupa alat laboratorium senilai Rp80.835.000 sesuai BAST Nomor KN.01.02/H.III/6828/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- f. Kantor Pusat BPKP melakukan transfer keluar senilai Rp269.329.230 dengan perincian:
 - 1) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan berupa *Incubator, Microscope, Stabilizer* senilai Rp156.229.590;
 - 2) Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan berupa Rak besi senilai Rp2.800.000;
 - 3) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berupa Tensimeter dan *Laboratory High Speed Centrifuge* senilai Rp110.299.640;transfer keluar ini seluruhnya ditujukan kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sesuai BAST Nomor KN.01.06/H.I/6502/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
- g. Kantor Pusat BPKP (unit kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) melakukan transfer keluar kepada



Politeknik Kesehatan Bandung berupa 300 buah HB Meter senilai Rp3.013.650.000 sesuai BAST Nomor KN.01.02/H.III/6955/2024 tanggal 4 November 2024.

2. Transfer keluar likuidasi peralatan dan mesin sebesar Rp271.066.303.861 terdapat pada satker:
 - a. B2P2VRP Salatiga: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp60.542.746.907 kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai BAST Nomor KN.01.06/IX.1/171/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - b. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp31.750.496.542 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - c. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp58.124.606.452 kepada Balai Labkesmas Papua sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - d. Balai Litbangkes Banjarnegara: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp18.440.346.604 kepada Balai Labkesmas Banjarnegara sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/H.XI/53/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - e. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer



keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp19.596.051.546 kepada Balai Labkesmas Donggala sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.

- f. Balai Litbangkes Tanahbumbu: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp12.864.567.364 kepada Loka Labkesmas Tanahbumbu sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.4/87/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- g. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp28.861.813.875 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai dengan BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- h. Balai Litbangkes Baturaja: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp13.205.869.243 kepada Loka Labkesmas Baturaja sesuai BAST Nomor KN.01.07/H.XVI/191/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- i. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp11.986.845.298 kepada Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- j. Loka Litbangkes Waikabubak: transaksi transfer keluar likuidasi aset peralatan dan



mesin sebesar Rp15.692.960.030 kepada Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/1/52/2024 tanggal 15 Maret 2024.

3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp8.857.650.004 terdapat pada unit kerja:
 - a. Sekretariat Badan senilai Rp1.678.525.126 berupa peralatan dan mesin;
 - b. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan senilai Rp61.541.000 berupa 4 unit sepeda motor;
 - c. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan senilai Rp2.189.105.399 berupa peralatan dan mesin; dan
 - d. Pusat Kebijakan Global dan Teknologi Kesehatan senilai Rp4.928.478.479 berupa peralatan dan mesin.
4. Koreksi pencatatan senilai Rp4.153.167.580 terdapat pada unit kerja:
 - a. Sekretariat Badan senilai Rp2.319.601.580 atas aset peralatan laboratorium;
 - b. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan senilai Rp1.833.566.000 atas aset semula alat laboratorium listrik dan mekanik lainnya menjadi *Automatic Laboratory Steam Generator*;
5. Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp65.770.938 pada Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan berupa alat laboratorium sebagai koreksi atas setoran pengembalian belanja modal TAYL.



*Gedung dan
Bangunan*

*Rp194.998.359.
440*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp194.998.359.440 dan 461.039.419.392.

Tabel 33
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	Rp	461.039.419.392
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi Masuk	Rp	9.133.964.036
Pengembangan aset melalui KDP	Rp	16.213.618.000
Koreksi Susulan	Rp	2.319.601.580
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	(86.646.066.251)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(9.133.964.036)
Transfer Keluar Likuidasi	Rp	(197.928.213.281)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	194.998.359.440
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	(59.204.662.371)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	135.793.697.069

Transaksi mutasi tambah nilai gedung dan bangunan adalah:

1. Reklasifikasi Masuk pada Sekretariat Badan senilai Rp9.133.964.036 berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen dan Bangunan Gedung Arsip Permanen.
2. Pengembangan aset melalui KDP sebesar Rp16.213.618.000 terdapat pada satker:
 - a. Sekretariat Badan senilai Rp2.091.830.868 merupakan penyelesaian rehab gedung C lantai 3 dan 4.
 - b. Loka Litbangkes Waikabubak senilai Rp14.121.787.132 merupakan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung laboratorium permanen.
3. Koreksi Susulan pada Sekretariat Badan sebesar Rp2.319.601.580 berupa koreksi bangunan Gedung



Laboratorium Permanen yang semula tercatat sebagai peralatan dan mesin.

Transaksi mutasi kurang nilai gedung dan bangunan adalah:

1. Transfer keluar gedung dan bangunan sebesar Rp86.646.066.251 terdapat pada Kantor Pusat BPKP (unit kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) kepada satker tujuan:
 - a. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berupa gedung laboratorium permanen sebesar Rp37.450.153.000 sesuai BAST Nomor KN.01.02/H.III/3957/2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - b. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berupa Laboratorium Reposisori sebesar Rp22.040.715.251 sesuai BAST Nomor KN.01.02/H.I/4115/2024 tanggal 5 Juni 2024.
 - c. Kantor Pusat Sekretariat Jenderal unit kerja Biro Umum berupa gedung kantor permanen, gedung kantor semi permanen, dan gedung instalasi lainnya dengan nilai total sebesar Rp27.155.198.000 sesuai BAST Nomor KN.01.03/H.III/5462/2024 tanggal 17 Juli 2024.
4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp9.133.964.036 senilai Rp9.133.964.036 berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen dan Bangunan Gedung Arsip Permanen.
5. Transfer keluar likuidasi gedung dan bangunan sebesar Rp197.928.213.281 terdapat pada satker:



- a. B2P2VRP Salatiga: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp20.601.002.410 kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai BAST Nomor KN.01.06/IX.1/171/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- b. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp10.260.105.398 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- c. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp66.753.726.772 kepada Balai Labkesmas Papua sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- d. Balai Litbangkes Banjarnegara: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp9.985.187.665 kepada Balai Labkesmas Banjarnegara sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/H.XI/53/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- e. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp17.130.950.550 kepada Balai Labkesmas Donggala sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- f. Balai Litbangkes Tanahbumbu: transaksi



transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp10.721.799.825 kepada Loka Labkesmas Tanahbumbu sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.4/87/2024 tanggal 15 Januari 2024.

- g. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp12.125.643.300 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai dengan BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- h. Balai Litbangkes Baturaja: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp18.391.154.387 kepada Loka Labkesmas Baturaja sesuai BAST Nomor KN.01.07/H.XVI/191/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- i. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp14.635.417.842 kepada Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- j. Loka Litbangkes Waikabubak: transaksi transfer keluar likuidasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp17.323.225.132 kepada Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/1/52/2024 tanggal 15 Maret 2024.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan*
Rp2.759.050.69

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024



5

dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.759.050.695 dan Rp15.062.080.161.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 34
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	15.062.080.161
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar Likuidasi	Rp	(12.303.029.466)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.759.050.695
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	(2.444.703.797)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	314.346.898

Transaksi mutasi kurang nilai jalan, irigasi, dan jaringan:

1. Transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp12.303.029.466 terdapat pada:
 - a. B2P2VRP Salatiga: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp748.198.300 kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai BAST Nomor KN.01.06/IX.1/171/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - b. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.166.323.295 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - c. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp5.802.561.786 kepada Balai



Labkesmas Papua sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.

- d. Balai Litbangkes Banjarnegara: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp204.108.600 kepada Balai Labkesmas Banjarnegara sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/H.XI/53/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- e. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.851.877.500 kepada Balai Labkesmas Donggala sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- f. Balai Litbangkes Tanahbumbu: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp759.100.680 kepada Loka Labkesmas Tanahbumbu sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.4/87/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- g. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp518.106.000 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai dengan BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- h. Balai Litbangkes Baturaja: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp877.396.205 kepada Loka Labkesmas Baturaja sesuai BAST Nomor



KN.01.07/H.XVI/191/2024 tanggal 21 Maret 2024.

- i. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp20.417.000 kepada Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- j. Loka Litbangkes Waikabubak: transaksi transfer keluar likuidasi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp354.940.100 kepada Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/1/52/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Aset Tetap

Lainnya

Rp4.842.292.125

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.842.292.125 dan Rp7.361.968.466.

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 35
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	7.361.968.466
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	47.492.460
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar Likuidasi	Rp	(2.567.168.801)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	4.842.292.125

Transaksi mutasi tambah nilai aset tetap lainnya sebesar Rp47.492.460 merupakan pembelian 108 buah monografi pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan



Kesehatan.

Transaksi mutasi kurang nilai aset tetap lainnya:

1. Transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp2.567.168.801 terdapat pada:
 - a. B2P2VRP Salatiga: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp757.123.167 kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai BAST Nomor KN.01.06/IX.1/171/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - b. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp308.952.740 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - c. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp285.285.000 kepada Balai Labkesmas Papua sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - d. Balai Litbangkes Banjarnegara: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp121.589.635 kepada Balai Labkesmas Banjarnegara sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/H.XI/53/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - e. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp355.442.465 kepada Balai Labkesmas



Donggala sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.

- f. Balai Litbangkes Tanahbumbu: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp78.675.000 kepada Loka Labkesmas Tanahbumbu sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.4/87/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- g. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp257.187.600 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai dengan BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- h. Balai Litbangkes Baturaja: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp19.786.800 kepada Loka Labkesmas Baturaja sesuai BAST Nomor KN.01.07/H.XVI/191/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- i. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp304.214.666 kepada Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- j. Loka Litbangkes Waikabubak: transaksi transfer keluar likuidasi aset tetap lainnya sebesar Rp78.911.728 kepada Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan BAST Nomor



KN.01.06/1/52/2024 tanggal 15 Maret 2024.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp14.539.638.284 yang merupakan pembangunan Aset Tetap yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	14.539.638.284
Mutasi tambah:		
Pembelian/perolehan/penambahan KDP	Rp	89.188.000
Pengembangan KDP	Rp	3.487.356.868
Mutasi kurang:		
Pengembangan nilai aset	Rp	(16.213.618.000)
Koreksi Pencatatan KDP	Rp	(1.306.895.552)
Transfer Keluar Likuidasi	Rp	(595.669.600)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri atas:

1. Pembelian/perolehan/penambahan KDP sebesar Rp89.188.000 terdapat pada Kantor Pusat BKKBN merupakan perencanaan pekerjaan konstruksi rehab gedung C lantai 3 dan 4 BKKBN.
2. Pengembangan KDP sebesar Rp3.487.356.868 terdapat pada Satker:
 - a. Loka Litbangkes Waikabubak sebesar Rp1.484.714.000 merupakan lanjutan pekerjaan pembangunan gedung laboratorium.
 - b. Kantor Pusat BKKBN sebesar Rp2.002.642.868 merupakan pekerjaan konstruksi



rehab gedung C lantai 3 dan 4 BPKP.

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri atas:

1. Pengembangan aset gedung dan bangunan sebesar Rp16.213.618.000 terdapat pada Satker:
 - a. Loka Litbangkes Waikabubak merupakan pencatatan aset definitif gedung laboratorium permanen senilai Rp14.121.787.132.
 - b. Kantor Pusat BPKP (unit kerja Sekretariat Badan) merupakan pencatatan aset definitif gedung kantor senilai Rp2.091.830.868.
2. Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp1.306.895.552 terdapat pada satker Loka Litbangkes Waikabubak merupakan koreksi pencatatan atas transaksi akrual pada akhir tahun 2023.
3. Transfer keluar likuidasi sebesar Rp595.669.600 terdapat pada:
 - a. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp119.133.600 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - b. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp13.700.000 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai dengan BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - c. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp404.436.000 kepada



Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.

- d. Loka Litbangkes Waikabubak: transaksi transfer keluar likuidasi aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp58.400.000 kepada Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/1/52/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Tabel 37
Rincian Sebaran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
per 31 Desember 2024

KETERANGAN	31 DES 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 DES 2024
Kantor Pusat BPKP	-	2.091.830.868	(2.091.830.868)	-
Balai Litbangkes Magelang	119.133.600	-	(119.133.600)	-
Balai Litbangkes Aceh	13.700.000	-	(13.700.000)	-
Loka Litbangkes Pangandaran	404.436.000	-	(404.436.000)	-
Loka Litbangkes Waikabubak	14.002.368.684	1.484.714.000	(15.487.082.684)	-
Jumlah	14.539.638.284	3.576.544.868	(18.116.183.152)	-



Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp(298.135.359.772)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(298.135.359.772) dan Rp(595.598.605.733).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 38
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	79.836.993.000		79.836.993.000
2	Peralatan dan Mesin	266.906.137.616	236.485.993.604	30.420.144.012
3	Gedung dan Bangunan	194.998.359.440	59.204.662.371	135.793.697.069
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.759.050.695	2.444.703.797	314.346.898
5	Aset Tetap Lainnya	4.842.292.125		4.842.292.125
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-
Jumlah		549.342.832.876	298.135.359.772	251.207.473.104

Aset Lainnya

Rp59.380.392.586

C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp59.380.392.586 dan Rp10.239.241.598. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak

Berwujud

Rp1.868.216.251

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.868.216.251 dan



Rp5.152.427.417.

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi. *software* komputer. lisensi dan *franchise*. hak cipta (*copyright*). paten. dan hak lainnya. dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Tabel 39
Mutasi Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	5.152.427.417
Mutasi tambah:		
Perolehan Lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	(8.575.000)
Transfer Keluar Likuidasi	Rp	(1.942.438.166)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(1.012.635.000)
Penghapusan	Rp	(320.563.000)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.868.216.251
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024	Rp	(1.709.763.457)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	158.452.794

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud terdiri atas transaksi:

1. Transfer keluar sebesar Rp8.575.000 berupa paten terdapat pada Kantor Pusat BPKP kepada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi sesuai BAST



dengan Nomor KN.01.02/H.1/4063/2024 tanggal 3 Juni 2024, dengan perincian:

- a. Paten senilai Rp6.000.000 terdapat pada unit kerja Sekretariat Badan.
 - b. Paten senilai Rp2.575.000 terdapat pada unit kerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.
2. Transfer keluar likuidasi sebesar Rp1.942.438.166 terdapat pada satker:
- a. B2P2VRP Salatiga: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp1.419.280.167 kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai BAST Nomor KN.01.06/IX.1/171/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - b. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp115.370.000 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - c. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp227.987.999 kepada Balai Labkesmas Papua sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.
 - d. Balai Litbangkes Banjarnegara: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp1.000.000 kepada Balai Labkesmas Banjarnegara sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/H.XI/53/2024 tanggal 15 Januari



2024.

- e. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp111.700.000 kepada Balai Labkesmas Donggala sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- f. Balai Litbangkes Tanahbumbu: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp65.700.000 kepada Loka Labkesmas Tanahbumbu sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.4/87/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- g. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp 200.000 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- h. Balai Litbangkes Baturaja: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp200.000 kepada Loka Labkesmas Baturaja sesuai BAST Nomor KN.01.07/H.XVI/191/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- i. Loka Litbangkes Pangandaran: transaksi transfer keluar likuidasi aset tak berwujud sebesar Rp1.000.000 kepada Loka Labkesmas Pangandaran sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XII.1.1/017/2024 tanggal 15 Maret 2024.



3. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp1.012.635.000 berupa software.

Rincian mutasi per akun Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Mutasi per Akun Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2024
1	Hak Cipta	Rp 26.900.000	Rp -	Rp (13.600.000)	Rp 13.300.000
2	Paten	Rp 25.650.000	Rp -	Rp (11.575.000)	Rp 14.075.000
3	Software	Rp 5.099.877.417	Rp -	Rp (3.259.036.166)	Rp 1.840.841.251
	Jumlah	Rp 5.152.427.417		Rp (3.284.211.166)	Rp 1.868.216.251

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Saldo Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Hak Cipta	Rp 13.300.000	Rp 1.061.039	Rp 12.238.961
2	Paten	Rp 14.075.000	Rp 7.320.625	Rp 6.754.375
3	Software	Rp 1.840.841.251	Rp 1.701.381.793	Rp 139.459.458
	Jumlah	Rp 1.868.216.251	Rp 1.709.763.457	Rp 158.452.794

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp59.173.642.01
2

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp59.173.642.012 dan Rp9.796.077.610. Dana yang dibatasi penggunaannya adalah Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga berupa Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yaitu rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal akhir tahun dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai



dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 42
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai RPATA (SP2D Penampungan)
1	Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung C Lantai 3 dan 4 BKPK	Rp 1.329.081.207
2	Pengadaan Jasa Keamanan dan Pengemudi BKPK TA 2024	Rp 520.367.720
3	Pengadaan Layanan Jasa Kebersihan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024	Rp 661.727.863
4	Pengadaan Meubelair Gedung BKPK	Rp 563.973.000
5	Pengadaan Jasa Lainnya Pelaksanaan Kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024	Rp 56.098.492.222
Jumlah		Rp 59.173.642.012

Dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp59.173.642.012 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung C Lantai 3 dan 4 BKPK dengan nilai RPATA Rp1.329.081.207. Pekerjaan ini telah selesai 100 persen pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah terbit SP2D Nomor 259991302005554 tanggal 13 Januari 2025.
2. Pengadaan Jasa Keamanan dan Pengemudi BKPK TA 2024 dengan nilai RPATA Rp520.367.720. Pekerjaan ini telah selesai 100 persen pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah terbit SP2D Nomor 259991302000193 tanggal 3 Januari 2025.
3. Pengadaan Layanan Jasa Kebersihan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 dengan nilai RPATA Rp661.727.863. Pekerjaan ini telah selesai 100 persen pada tanggal 31 Desember



2024 dan telah terbit SP2D Nomor 259991305000019 tanggal 3 Januari 2025.

4. Pengadaan Meubelair Gedung BPKP dengan nilai RPATA Rp563.973.000. Pekerjaan ini telah selesai 100 persen pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah terbit SP2D Nomor 259991302001412 tanggal 3 Januari 2025.
5. Pengadaan Jasa Lainnya Pelaksanaan Kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 dengan nilai RPATA Rp56.098.492.222 sesuai SPM Penampungan Nomor 00888T/416151/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan SP2D Nomor 241820301000425 tanggal 31 Desember 2024. Kemajuan pekerjaan fisik per 31 Desember 2024 mencapai sebesar 75,32 persen. Pekerjaan masih dilanjutkan dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Maret 2025.

Aset Lain-Lain

Rp15.188.658.214

4

C.3.3. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp15.188.658.214 dan Rp14.043.875.798.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN.



Tabel 43
Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		Rp	14.043.875.798
Mutasi tambah:			
Penghentian aset dari penggunaan		Rp	9.870.285.004
Mutasi kurang:			
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan		Rp	(5.291.569.955)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif		Rp	(69.832.000)
Transfer Keluar Likuidasi		Rp	(3.364.100.633)
Saldo per 31 Desember 2024		Rp	15.188.658.214
Akum. Penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2024		Rp	(15.140.360.434)
Nilai Buku per 31 Desember 2024		Rp	48.297.780

Mutasi tambah Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp9.870.285.004 terdapat pada Kantor Pusat BKKPK pada unit kerja:
 - a. Sekretariat Badan berupa peralatan dan mesin dengan nilai total sebesar Rp2.358.630.126;
 - b. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan senilai Rp61.541.000 berupa 4 unit sepeda motor.
 - c. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan berupa peralatan dan mesin dengan nilai total sebesar Rp2.189.105.399;
 - d. Pusat Kebijakan Global dan Teknologi Kesehatan berupa peralatan dan mesin dengan nilai total sebesar Rp5.261.008.479.

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp5.291.569.955 terdapat pada Kantor Pusat BKKPK terdapat pada unit kerja:
 - a. Sekretariat Badan berupa peralatan dan mesin serta software dengan nilai total sebesar



- Rp2.358.630.126.
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan berupa 1 unit mini bus penumpang 14 orang dan software komputer dengan nilai Rp194.700.000.
 - c. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan berupa peralatan dan mesin dengan nilai total sebesar Rp2.256.017.579.
 - d. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berupa *Deep Freezer* dan software komputer dengan total nilai Rp482.222.250.
2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp69.832.000 terdapat pada:
 - a. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan berupa 2 buah Note Book senilai Rp29.182.000.
 - b. Pusat Kebijakan Global dan Teknologi Kesehatan berupa 15 buah alat pemadam kebakaran senilai Rp40.650.000.
 3. Transfer keluar likuidasi sebesar Rp3.364.100.633 terdapat pada satker:
 - a. Balai Litbangkes Magelang: transaksi transfer keluar likuidasi aset lain-lain sebesar Rp2.059.579.371 kepada Balai Labkesmas Magelang sesuai BAST Nomor KN.01.07/XI.4/170/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - b. Balai Litbangkes Papua: transaksi transfer keluar likuidasi aset lain-lain sebesar



Rp339.271.499 kepada Balai Labkesmas Papua sesuai dengan BAST Nomor KN.01.06/XI.11/97/2024 tanggal 15 Januari 2024.

- c. Balai Litbangkes Donggala: transaksi transfer keluar likuidasi aset lain-lain sebesar Rp348.863.500 kepada Balai Labkesmas Donggala sesuai dengan BAST Nomor KN.01.07/XI.7/111/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- d. Balai Litbangkes Aceh: transaksi transfer keluar likuidasi aset lain-lain sebesar Rp616.386.263 kepada Balai Labkesmas Banda Aceh sesuai BAST Nomor KN.01.05/B.XI.10.1/021/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Rincian Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

No	Satuan Kerja	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
1	KANTOR PUSAT BPKP	15.188.658.214	-
	Sub Total	15.188.658.214	-
	Total		15.188.658.214

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(16.850.123.891)
91)*

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(16.850.123.891) dan



Rp(18.753.139.227).

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 45
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2024

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	13.300.000	(1.061.039)	12.238.961
2	Paten	14.075.000	(7.320.625)	6.754.375
3	Software	1.840.841.251	(1.701.381.793)	139.459.458
	Sub Jumlah A	1.868.216.251	(1.709.763.457)	158.452.794
B	Aset Lainnya			
4	Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15.188.658.214	(15.140.360.434)	48.297.780
5	Aset Tak Berwujud yg tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	-
	Sub Jumlah B	15.188.658.214	(15.140.360.434)	48.297.780
	Total A + B	17.056.874.465	(16.850.123.891)	206.750.574

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp29.827.848.714*

4

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Aset Lainnya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.827.848.714 dan Rp8.959.362.572. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.



Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp17.298.898.08
4

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp17.298.898.084 dan Rp8.959.362.572. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Tabel 46
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	12.235.638
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	728.813.471	223.867.772
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	16.570.084.613	8.723.259.162
Jumlah	17.298.898.084	8.959.362.572

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp17.298.898.613 di Kantor Pusat BKKP terdiri dari:

1. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp728.813.471 dengan perincian:
 - a. Tagihan langganan listrik sebesar Rp725.077.296.
 - b. Tagihan langganan telepon sebesar Rp3.736.175.
2. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp16.570.084.613 merupakan utang yang diakui karena telah menerima hak atas barang/jasa namun sampai dengan akhir tahun belum dilakukan pembayaran kepada penyedia, dengan perincian:
 - a. PT. LAM JAYA MANDIRI PRATAMA atas



Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung C Lantai 3 dan 4 BPKP dengan nilai sebesar Rp1.329.081.207 sesuai BAST Nomor BJ.01.03/H.VI.1C/2718/2024 tanggal 23 Desember 2024.

- b. PT. WARD SERVIS INDONESIA atas Pekerjaan Jasa Keamanan dan Pengemudi BPKP TA 2024 dengan nilai sebesar Rp520.367.720 sesuai BAST Nomor BJ.01.04/PPK7.2/275/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- c. PT. SETRA SARI atas Pekerjaan Layanan Jasa Kebersihan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp661.727.863 sesuai dengan BAST Nomor BJ.01.04/PPK7.1/207/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- d. CV. KUTAI ABADI KARYA atas Pengadaan Meubelair Gedung BPKP dengan nilai sebesar Rp563.973.000 sesuai BAST Nomor BJ.01.04/PPK7.2/273/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- e. PT. SUCOFINDO atas Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 senilai Rp13.494.934.823 dengan perincian:
 - 1) Kemajuan pekerjaan fisik di tahun 2024 senilai Rp130.022.911.093, terdiri dari:
 - kemajuan pekerjaan termin 1 senilai Rp41.568.966.029;
 - kemajuan pekerjaan termin 2 senilai Rp62.430.059.611;



- kemajuan pekerjaan akhir tahun per 31 Desember 2024 senilai Rp26.023.885.453 sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2347/DIRLIND-XII/LSI/2024 tanggal 31 Desember 2024.

2) Pembayaran yang telah dilakukan di tahun 2024 sebesar Rp116.527.976.270.

Ekuitas

Rp295.633.770.3

52

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp295.633.770.352 dan Rp788.706.632.434. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan

PNBP

Rp410.216.914

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp410.216.914 dan Rp4.038.609.585.

Tabel 47

Perbandingan Rincian Pendapatan-LO s.d. 31 Desember 2024 dan 2023

JENIS PENDAPATAN	31 DES 2024	31 DES 2023	%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN:			
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4.073.500	41.798.690	(90,25)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	15.543.614	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	49.145.000	100,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	-	124.920.000	(100,00)
Pendapatan Pendidikan Budaya Ristek:			
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	228.550.000	(100,00)
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	-	1.551.400.985	(100,00)
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan:			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	11.315.142	1.321.452.432	(99,14)
Pendapatan dari penutupan rekening	-	46.932	(100,00)
Pendapatan Iuran dan Denda:			
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	394.828.272	690.201.932	(42,80)
Pendapatan Lain-lain:			
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	15.550.000	(100,00)
Jumlah	410.216.914	4.038.609.585	(89,84)

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp4.073.500 terdapat pada Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan merupakan penyetoran PNBP hasil pemusnahan arsip BKKPK sesuai dengan bukti setor NTB: 482068837369 dan NTPN: 0985D3CIFKDM72DR tanggal 26 Juli 2024.



2. Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) senilai Rp11.315.142 berupa jasa giro atas pengelolaan rekening lainnya RPL 140 PDHL BKPK WHO1 sebagai penampung dana hibah dalam bentuk uang dari WHO pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dengan nomor register 22ZGN5FA.
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp394.828.272 terdapat pada satker:
 - a. Loka Litbangkes Waikabubak sebesar Rp54.166.568 berasal dari pekerjaan dengan mekanisme pembayaran RPATA tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2024, dengan perincian:
 - 1) keterlambatan 2 hari di tahun 2024 atas penyelesaian pekerjaan pengadaan meubelair yang sebesar Rp1.790.000 sesuai BAST Nomor KN.01.04/1/04/2024 tanggal 2 Januari 2024;
 - 2) keterlambatan 12 hari di tahun 2024 atas penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi lanjutan Laboratorium BSL-2 sebesar Rp52.376.568 sesuai BAST Nomor KN.01.01/1/50/2024 tanggal 12 Januari 2024.
 - b. Kantor Pusat BKPK (unit kerja Sekretariat Badan) sebesar Rp340.661.704 merupakan denda keterlambatan selama 8 hari di tahun 2024 atas Kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 sesuai Berita Acara Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor BJ.01.03/H.VI.2a/2946/2024 tanggal 31 Desember 2024.



Beban
Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp55.178.270.462. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 48
Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	0	19.707.634.100	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	301.089	(100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1.416.801.030	(100,00)
Beban Tunj. Anak PNS	0	439.262.820	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	0	204.820.000	(100,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1.992.181.460	(100,00)
Beban Tunj. PPh PNS	0	45.863.155	(100,00)
Beban Tunj. Beras PNS	0	1.199.057.940	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	0	2.596.351.000	(100,00)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	149.500.000	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PNS	0	267.354.692	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	0	166.124.000	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	4.230	(100,00)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2.966.500	(100,00)
Beban Tunjangan Anak PPPK	0	1.127.270	(100,00)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	17.585.000	(100,00)
Beban Tunjangan Beras PPPK	0	6.155.700	(100,00)
Beban Uang Makan PPPK	0	32.671.000	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PPPK	0	185.000	(100,00)
Beban Uang Lembur		146.210.000	(100,00)
Beban Uang Lembur PPPK		434.000	(100,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	26.542.896.351	(100,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	0	242.784.125	(100,00)
Jumlah	-	55.178.270.462	(100,00)



Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi antara lain:

1. Adanya perpindahan status pegawai satker daerah di lingkungan BKKBN seiring perubahan fungsi organisasi dan tata kerja pada Balai Besar/Balai/Loka Litbangkes yang bertransformasi menjadi Balai Besar/Balai/Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat dibawah Unit Utama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
2. Pembayaran belanja pegawai untuk Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dibayarkan melalui DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

**Beban****Persediaan****Rp2.636.654.3****38****D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.636.654.338 dan Rp67.037.695.959.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.630.116.694	52.641.867.078	(95,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	633.278.976	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	6.537.644	13.762.549.905	(99,95)
Jumlah	2.636.654.338	67.037.695.959	(96,07)

Beban Barang**dan Jasa****Rp292.891.114.****619****D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp292.891.114.619 dan Rp327.321.384.908.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.



Tabel 50
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	21.168.145.553	35.090.000.165	(39,67)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	149.906.550	1.050.026.033	(85,72)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	52.760.640	14.209.484.077	(99,63)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	277.148.000	1.773.094.000	(84,37)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.014.862.650	582.156.640	74,33
Beban Bahan	7.883.398.702	105.381.563.363	(92,52)
Beban Honor Output Kegiatan	3.171.624.000	8.280.445.000	(61,70)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	22.332.880.813	22.813.552.815	(2,11)
Beban Barang Non Operasional - Penanggulangan Pandemi COVID-19	-	104.821.475	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	382.835.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	9.275.805.947	12.474.990.771	(25,64)
Beban Langganan Telepon	101.365.719	200.008.482	(49,32)
Beban Langganan Air	738.841.570	853.336.023	(13,42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	69.894.300	625.490.367	(88,83)
Beban Jasa Konsultan	3.500.227.160	187.412.000	1.767,66
Beban Sewa	3.083.649.679	3.811.436.864	(19,09)
Beban Jasa Profesi	3.565.315.000	3.008.500.000	18,51
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	-	93.900.000	
Beban Jasa Lainnya	216.505.288.336	115.389.246.198	87,63
Beban Jasa - Penanggulangan COVID-19	-	997.780.674	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	11.304.961	(100,00)
Jumlah	292.891.114.619	327.321.384.908	(10,52)

Beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sekitar 10,52 persen dibandingkan beban barang dan jasa pada periode yang sama tahun sebelumnya.

*Beban
Pemeliharaan
Rp8.909.796.354*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.909.796.354 dan Rp32.213.633.764. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.



Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	5.824.085.143	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	15.388.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.909.079.279	20.499.473.630	(66,30)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	778.506.653	2.829.004.444	(72,48)
Beban Pemeliharaan Irigasi	-	55.255.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	218.076.705	1.454.973.931	(85,01)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	28.074.448	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.004.133.717	1.500.164.628	(33,07)
Beban Persediaan suku cadang	-	7.214.540	(100,00)
Jumlah	8.909.796.354	32.213.633.764	(72,34)

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan 72,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

*Beban
Perjalanan
Dinas*
*Rp100.877.959.
209*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp100.877.959.209 dan Rp335.622.538.660. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.



Tabel 52
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	31.200.814.372	48.382.204.533	(35,51)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.124.704.001	185.971.723.261	(98,32)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.101.336.189	11.732.785.698	88,37
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	28.516.060	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.654.594.948	81.809.494.208	(60,08)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	11.796.509.699	7.697.814.900	53,24
Jumlah	100.877.959.209	335.622.538.660	(69,94)

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sekitar 69,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini antara lain terdapat pada beban perjalanan dinas biasa, beban perjalanan dinas dalam kota dan beban perjalanan dinas paket meeting luar kota.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp10.831.021,6*
17

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.831.021.617 dan Rp24.843.720.677.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang riset dan penelitian kesehatan.



Tabel 53
Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	%
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	10.831.021.617	12.212.027.045	(11,31)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	8.761.269.810	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	3.870.423.822	(100,00)
Jumlah	10.831.021.617	24.843.720.677	(56,40)

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. nilai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat mengalami penurunan sebesar 56,40 persen.

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.831.021.617 merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Universitas Airlangga yang akan digunakan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan vaksin Covid-19 melalui uji klinik vaksin merah putih (Inavac) (RF-14) sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Universitas Airlangga Nomor KS.01.02/H.VI.2b/679/2024 dan Nomor 107/UN3/HK.07.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Uji Klinik Pengembangan Vaksin Merah Putih Sub Platform Inactivated Virus Covid-19 Universitas Airlangga.

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31



Rp22.260.669.310
10 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.260.669.310 dan Rp68.099.146.182.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 54
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.298.006.202	53.284.882.550	(73,17)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.710.325.821	13.779.370.032	(44,04)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	40.027.826	435.083.737	(90,80)
Beban Penyusutan Irigasi	5.059.024	118.978.163	(95,75)
Beban Penyusutan Jaringan	4.699.327	161.169.462	(97,08)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN:	22.058.118.200	67.779.483.944	(67,46)
Beban Amortisasi Hak Cipta	210.042	457.950	(54,13)
Beban Amortisasi Paten	918.125	1.207.500	(23,96)
Beban Amortisasi Software	183.914.733	290.796.087	(36,75)
JUMLAH AMORTISASI:	185.042.900	292.461.537	(36,73)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17.508.210	27.200.701	(35,63)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN:	17.508.210	27.200.701	(35,63)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	22.260.669.310	68.099.146.182	(67,31)

D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp441.673.281

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Nilai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah



Rp441.673.281 dan Rp(11.952.919.204) yang ditunjukan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 55
Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	%
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan pelepasan aset non lancar	232.132.520	269.795.007	(13,96)
Beban pelepasan aset non lancar	1.265.000	4.817.654.494	(99,97)
Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar	230.867.520	(4.547.859.487)	(105,08)
Pendapatan keg. Non operasional lainnya	210.805.761	6.418.512.849	(96,72)
Beban keg. Non operasional lainnya	-	13.823.572.566	(100,00)
Surplus/Defisit keg. Non Ops Lainnya	210.805.761	(7.405.059.717)	(102,85)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	441.673.281	(11.952.919.204)	(103,70)

Kegiatan Non Operasional terdiri atas:

1. Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp232.132.520 pada Kantor Pusat BPKP antara lain berupa:
 - a. Penjualan satu paket inventaris kantor senilai Rp52.780.000 sesuai risalah lelang nomor 363/08.03/2024-01 tanggal 29 Februari 2024;
 - b. Penjualan satu unit mobil Mitsubishi L300 Nopol B7572PPA senilai Rp65.000.000 sesuai risalah lelang nomor 762/08.03/2024-01 tanggal 23 April 2024;
 - c. Penjualan satu paket inventaris kantor senilai Rp93.348.500 sesuai risalah lelang nomor 1217/08.03/2024-01 tanggal 11 Juni 2024.
 - d. Penjualan satu paket inventaris kantor senilai Rp21.004.020 sesuai risalah lelang nomor 2366/08.03/2024-01 tanggal 11 September 2024.
2. Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp1.265.000 terdapat pada satker Kantor Pusat BPKP merupakan transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan



berupa 2 (dua) buah pesawat telepon yang pada saat dilakukan pencatatan barang yang mau dihapuskan masih memiliki nilai manfaat masing-masing adalah sebesar Rp632.500 sehingga total kerugian pelepasan aset senilai Rp1.265.000.

Sedangkan Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri atas:

1. Pendapatan kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp210.805.761 antara lain berupa:
 - a. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp2.080.667 terdapat pada satker Balai Litbangkes Donggala berupa pengembalian uang makan pegawai sebesar Rp492.100 dan pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp1.588.567;
 - b. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp204.725.094 terdapat pada Kantor Pusat BKKPK dengan perincian:
 - 1) pengembalian belanja perjalanan dinas kegiatan validasi tim SKI TA 2023 atas SPM Nomor 00893T dengan kode kegiatan 6833.PBG.002.701.H; Akun 524111 senilai Rp123.504.300 sesuai bukti setor dengan NTB 000000771543 dan NTPN 97A6A48VVEDMVMEU.
 - 2) pengembalian belanja perjalanan dinas kegiatan validasi tim SKI TA 2023 atas SPM Nomor 00895T dengan kode kegiatan 6833.PBG.002.701.H; Akun 524113 senilai Rp14.350.000 sesuai bukti setor dengan NTB 000000772204 dan NTPN 9199B48VVEDMVLF2.



- 3) pengembalian belanja perjalanan dinas kegiatan validasi tim SKI TA 2023 atas SPM Nomor 00892T dengan kode kegiatan 6833.PBG.002.701.H; Akun 524111 senilai Rp870.794 sesuai bukti setor dengan NTB 000000772883 dan NTPN 04ADC0NA0445BL1Q; dan
 - 4) Setoran berupa tindak lanjut LHA Kinerja Operasional TA 2017 dan 2018 di Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat atas kelebihan biaya perjalanan dinas kegiatan Studi Kohor dan TKA sebesar Rp41.000.000 sesuai bukti setor dengan NTB 782572274510 dan NTPN ED67B6U8EU5ALK0F.
 - 5) Setoran berupa tindak lanjut LHA Kinerja Operasional TA 2017 dan 2018 di Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat atas kelebihan biaya perjalanan dinas kegiatan Studi Kohor dan TKA senilai Rp25.000.000 sesuai bukti setor dengan NTB: 996913800363 dan NTPN:C185F1JNFVNIMC0Q.
- c. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp4.000.000 merupakan selisih lebih perbedaan kurs tukar mata uang *US Dollar* saat tanggal penerbitan SPM dengan tanggal penerbitan SP2D atas biaya kontribusi tahunan keanggotaan Indonesia dalam *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)*.



E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal

Rp788.706.632.

434

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp788.706.632.434 dan Rp1.075.294.180.652.

Defisit LO

Rp(437.555.325.

252)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp(437.555.325.252) dan Rp(918.230.700.231). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. kegiatan non operasional. sampai dengan pos luar biasa.

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp0

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp(14.930.000).

Koreksi atas reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi reklasifikasi masuk dan keluar BMN



*Koreksi Aset Non
Revaluasi*

Rp642.827.987

E.4 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp642.827.987 dan Rp(5.571.129.332).

Koreksi aset tetap non revaluasi ini senilai Rp642.827.987 terdapat pada Kantor Pusat BPKP dengan perincian:

1. Koreksi perubahan nilai berkurang senilai Rp(61.775.698) berupa alat laboratorium listrik dan mekanik lainnya senilai Rp(65.770.938) beserta akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp3.995.240.
2. Koreksi pencatatan senilai Rp(1.741.887.700) berupa alat laboratorium listrik dan mekanik lainnya senilai Rp(1.833.566.000) beserta akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp 91.678.300.
3. Koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp61.118.867 berupa aset *Automatic Laboratory Steam Generator* senilai Rp1.833.566.000 beserta akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp(1.772.447.133)
4. Jurnal penyesuaian manual atas transaksi penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu senilai Rp65.770.938.
5. Koreksi susulan penambahan nilai bangunan gedung laboratorium permanen senilai Rp2.319.601.580 yang semula tercatat sebagai peralatan dan mesin.

*Transaksi Antar
Entitas*

*Rp(56.160.364.8
17)*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar



Rp(56.160.364.817) dan Rp637.229.211.345.

Tabel 56
Rincian Transaksi Antar Entitas

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Selisih DKEL dan DDEL		
Ditagihkan Ke Entitas Lain	393.880.261.855	795.838.575.423
Diterima Dari Entitas Lain	(645.889.853)	(5.806.572.429)
Sub Jumlah	393.234.372.002	790.032.002.994
Selisih TM dan TK		
Transfer Masuk	-	21.787.213.312
Transfer Keluar	(521.935.358.576)	(289.564.598.721)
Sub Jumlah	(521.935.358.576)	(267.777.385.409)
Selisih Pengesahan Hibah		
Pengesahan Hibah Langsung	72.817.943.247	115.700.623.770
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(277.321.490)	(726.030.010)
Sub Jumlah	72.540.621.757	114.974.593.760
Transaksi Antar Entitas	(56.160.364.817)	637.229.211.345

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan (DDEL) dan belanja (DKEL) pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp393.880.261.855 sedangkan DDEL sebesar Rp(645.889.853).

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0.



Tabel 5
Transfer Masuk per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

No	SATKER	31 DES 2024
TRANSFER KELUAR		
1	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	-
	JUMLAH	-

Transfer masuk terdapat di Kantor Pusat BKKBN dengan nilai perolehan peralatan dan mesin senilai Rp820.349.130 beserta akumulasi penyusutan senilai Rp(820.349.130) sehingga nilai bukunya Rp0.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp521.935.358.576 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 58
Transfer Keluar per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

No	SATKER	31 DES 2024
TRANSFER KELUAR		
1	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	154.831.303.572
TRANSFER KELUAR LIKUIDASI		
2	BALAI LITBANGKES PAPUA	108.238.234.035
3	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT	31.026.300.600
4	BALAI LITBANGKES MAGELANG	34.397.704.418
5	BALAI LITBANGKES BATURAJA	36.751.685.749
6	BALAI LITBANGKES BANJARNEGARA	21.528.780.736
7	BALAI LITBANGKES TANAH BUMBU	20.253.629.836
8	BALAI LITBANGKES DONGGALA	23.485.915.382
9	BALAI LITBANGKES ACEH	26.654.850.458
10	LOKA LITBANGKES PANGANDARAN	29.885.439.175
11	LOKA LITBANGKES WAIKABUBAK	34.881.514.615
	JUMLAH	521.935.358.576

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar selengkapnya terdapat pada lampiran.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung adalah pengesahan pendapatan hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah



Langsung adalah pengesahan pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.817.943.247 dan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung adalah sebesar Rp277.321.490.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp72.817.943.247,- yang merupakan Pengesahan pendapatan hibah langsung di satker Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk jasa dari UNICEF kepada unit kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan senilai Rp358.495.200,- yang digunakan untuk mendukung kegiatan *providing technical support to strengthen data and digital innovation in Health Development Policy Agency* sesuai nomor register 2VG7LGA, BAST: KU.01.03/H.I/6988/2024 dan JSP-2024-028, KU.01.03/H.I/6988/2024 - 06/11/2024, MPHL-BJS: 00770T - 21/11/2024 dan Persetujuan MPHLL-BJS: 820701776963994908 - 21/11/2024.
2. Pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk jasa dari Tony Blair Institute kepada unit kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan senilai Rp538.400.000,- yang digunakan dalam rangka Memberikan dukungan pengembangan kebijakan



untuk peraturan pelaksanaan UU Kesehatan 2023: Benchmark dan rekomendasi untuk transformasi akreditasi rumah sakit sesuai dengan nomor register: 2B469RSA, BAST: KU.01.03/H.VI.1d/944/2024 dan 084/TBI-HLT/08/2024, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/936/2024 – 31/12/2024, MPHL-BJS: 00936T - 31/12/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 821884629977633204 - 31/12/2024.

3. Pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk jasa dari ThinkWell Institute kepada unit kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan senilai Rp10.809.605.165,- yang digunakan dalam rangka dukungan kerjasama pembiayaan kesehatan dan sistem kesehatan di Indonesia untuk Periode 2024 sesuai dengan nomor register: 2RKPJM2A, BAST: 613/TWI/XII/2024, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/947/2024 - 31/12/2024, MPHL-BJS: 00932T - 31/12/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 821857656976986722 - 31/12/2024.
4. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk jasa dari UNDP kepada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan senilai Rp248.072.645,- yang digunakan dalam rangka dukungan technical assistance dalam rangka Health Techonology Assesment pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sesuai dengan nomor register: 2EQNNKYA, BAST: 0002/HEART/2024, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/649/2024 - 12/09/2024, MPHL-BJS: 00600T - 27/09/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 81963818947811335 - 27/09/2024.



5. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk jasa dari USAID kepada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan senilai Rp44.846.142.120,- yang digunakan dalam rangka dukungan Health Financing Activity (HFA) sesuai dengan nomor register: 2MKPQYFA, BAST: 216/USAID-INA/BAST-Service/HEA, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/949/2024 - 31/12/2024, MPHL-BJS: 00931T - 31/12/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 821857644976986588 - 31/12/2024.
6. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk jasa dari USAID kepada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan senilai Rp3.385.738.944,- yang digunakan dalam rangka dukungan Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services (MTaPS) sesuai dengan nomor register: 2MKPQYFA, BAST: 173/USAID-INA/BAST-Service/HEA, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/826/2024 - 19/11/2024, MPHL-BJS: 00784T - 21/11/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 820772121963986071 - 21/11/2024.
7. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk jasa dari WHO kepada Pusat Kebijakan Kesehatan Globalisasi dan Teknologi Kesehatan senilai Rp1.410.000.000,- yang digunakan dalam rangka Joint Work Plan WHO Biennium 2024-2025 Health Policy Agency - Pusjak KGTK sesuai dengan nomor register: 22ZGN5FA, BAST: 1369/SERVICE/BAST-WHE/2024, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/952/2024 - 31/12/2024, MPHL-



- BJS: 00929T - 31/12/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 21841101976969546 - 31/12/2024.
8. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk jasa dari Tony Blaire Institute kepada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan senilai Rp2.051.200.000,- yang digunakan dalam rangka dukungan Strategi Agenda Transformasi Kesehatan sesuai dengan nomor register: 2B469RSA, BAST: KU.01.03/H.VI.1d/945/2024 dan 083/TBI-HLT/08/2024, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/938/2024 - 31/12/2024, MPHL-BJS: 00937T - 31/12/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 821929281978103170 - 31/12/2024.
9. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk jasa dari USAID kepada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan senilai Rp6.132.846.773,- yang digunakan dalam rangka dukungan Health Technical Assistance (BANTU II) sesuai dengan nomor register: 2MKPQYFA, BAST: 207/USAID-INA/BAST-Serviice/HEA, SP3HL-BJS: KU.01.03/H.VI.1d/937/2024 - 29/12/2024, MPHL-BJS: 00927T - 31/12/2024 dan Persetujuan MPHL-BJS: 821800442976638288 - 30/12/2024.
10. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dari WHO kepada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan senilai Rp3.037.442.400,- yang digunakan dalam rangka Joint Work Plan WHO Biennium 2024-2025 Health Policy Agency sesuai dengan nomor register: 22ZGN5FA, SP2HL: 00897T - 27/12/2024 dan SPHL: 241400000000080 - 31/12/2024. Atas hibah



tersebut, terdapat pengembalian hibah langsung dalam bentuk uang senilai Rp277.321.490,- sesuai dengan SP4HL: 00930T – 31/12/2024 dan SP3HL: 241400604050001 – 31/12/2024..

Ekuitas Akhir

Rp295.633.770.3

E.6 Ekuitas Akhir

52

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp295.633.770.352 dan Rp738.862.554.693. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari Nilai Ekuitas Awal Rp788.706.632.434 ditambah Nilai kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp(493.072.862.082) Sehingga nilai Ekuitas Akhir Rp295.633.770.352.



F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Kejadian penting setelah tanggal neraca:

1. Transaksi RPATA tahun 2024 senilai Rp59.173.642.012 seluruhnya telah diselesaikan di tahun 2025 dengan perincian:
 - a. Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung C Lantai 3 dan 4 BKKPK oleh PT. LAM JAYA MANDIRI PRATAMA dengan nilai sebesar Rp1.329.081.207. Atas transaksi tersebut telah terbit SPM pembayaran RPATA nomor 00001T/416151/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan SP2D nomor 259991302005554 tanggal 17 Januari 2025;
 - b. Pekerjaan Jasa Keamanan dan Pengemudi BKKPK TA 2024 oleh PT. WARD SERVIS INDONESIA dengan nilai sebesar Rp520.367.720 207. Atas transaksi tersebut telah terbit SPM pembayaran RPATA nomor 00004T/416151/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan SP2D nomor 259991302000193 tanggal 3 Januari 2025;
 - c. Pekerjaan Layanan Jasa Kebersihan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 oleh PT. SETRA SARI dengan nilai sebesar Rp661.727.863. Atas transaksi tersebut telah terbit SPM pembayaran RPATA nomor 00002T/416151/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan SP2D nomor 259991305000019 tanggal 3 Januari 2025;
 - d. Pengadaan Meubelair Gedung BKKPK oleh CV. KUTAI ABADI KARYA dengan nilai sebesar Rp563.973.000. Atas transaksi tersebut telah terbit SPM pembayaran RPATA nomor 00003T/416151/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan SP2D nomor 259991302001412 tanggal 3 Januari 2025;
 - e. Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 oleh PT. SUCOFINDO dengan nilai sebesar Rp56.098.492.222. Atas transaksi tersebut telah terbit:



- 1) SPM pembayaran RPATA nomor 00044T/416151/2025 tanggal 21 Maret 2025 dan SP2D nomor 259991302006679 tanggal 24 Maret 2025 dengan perincian:
 - nilai belanja sebesar Rp46.367.207.117;
 - nilai potongan PPN sebesar Rp4.594.948.453;
 - nilai potongan PPh sebesar Rp835.445.173;
 - nilai potongan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp2.100.806.732.
- 2) SPM penihilan RPATA nomor 00045T/416151/2025 tanggal 21 Maret 2025 dan SP2D nomor 251820301000035 tanggal 24 Maret 2025 dengan perincian:
 - Nilai belanja sebesar Rp9.731.285.105;
 - Nilai potongan penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp9.731.285.105.
2. Saldo utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp16.570.084.613 seluruhnya telah diselesaikan sesuai dengan informasi terkait transaksi RPATA pada poin ke-1.
3. Saldo belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp728.813.471 terdiri atas:
 - a. tagihan langganan listrik sebesar Rp725.077.296 telah dibayarkan melalui SPM nomor 00006T/416151/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan SP2D nomor 251821302000503 tanggal 17 Januari 2025;
 - b. tagihan langganan telepon sebesar Rp3.736.175 telah dibayarkan melalui SPM nomor 00005T/416151/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan SP2D nomor 251821301000074 tanggal 17 Januari 2025.
4. Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp340.661.074 telah diselesaikan melalui mekanisme potongan SPM pembayaran RPATA nomor 00044T/416151/2025



tanggal 21 Maret 2025 dengan nomor SP2D 259991302006679 tanggal 24 Maret 2025.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pengungkapan lainnya:

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kesehatan Nomor HK.02.02/A/288/2024 tentang Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan proses likuidasi pada satker sebagai berikut:
 - a. B2P2VRP Salatiga telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - b. Balai Litbangkes Magelang telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - c. Balai Litbangkes Papua telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - d. Balai Litbangkes Baturaja telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Maret 2024;
 - e. Balai Litbangkes Banjarnegara telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Maret 2024;
 - f. Balai Litbangkes Tanahbumbu telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - g. Balai Litbangkes Donggala telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - h. Balai Litbangkes Aceh telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - i. Loka Litbangkes Pangandaran telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024;
 - j. Loka Litbangkes Waikabubak telah melaksanakan proses likuidasi entitas akuntansi per 31 Januari 2024.



2. Monitoring Tindak lanjut atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:

- a. Aset tetap intrakomtabel belum informatif**

Pencatatan pada aplikasi SIMAN terdapat aset intrakomptabel yang tidak didukung dengan informasi berupa merk, tipe, atau alamat sebanyak 324 NUP.

Atas temuan ini telah ditindaklanjuti dengan proses pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN antara lain alamat gedung kantor, merk alat besar dan nomor SK Penetapan Status Penggunaan, nomor polisi kendaraan dan BPKB. Atas temuan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN.

- b. Aset tetap intrakomtabel dengan harga perolehan dan kuantitas 0 (nol)**

Pencatatan pada aplikasi SIMAN terdapat aset intrakomptabel dengan harga perolehan dan kuantitas 0 (nol), merupakan aset yang sudah dilakukan lelang tetapi belum dikeluarkan dari catatan berdasarkan SK yang terbit.

Atas temuan ini seluruh Satker telah menindaklanjuti aset dengan harga perolehan dan kuantitas 0 (nol).

- c. Aset tetap intrakomtabel dengan kondisi rusak berat**

Pencatatan pada aplikasi SIMAN terdapat aset intrakomptabel yang memiliki kondisi rusak berat sebanyak 5.032 NUP. Atas temuan ini ditindaklanjuti dengan proses pemindah tangangan dengan penjualan. Sampai dengan akhir tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebanyak 4.817 NUP. Masih terdapat 215 NUP yang belum ditindaklanjuti, proses akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3. Terdapat setoran pengembalian belanja modal TAYL senilai Rp65.770.938 sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023. Atas setoran pengembalian belanja modal ini telah dilakukan penyesuaian nilai aset peralatan dan mesin.



4. Program Percepatan Penurunan Stunting

Proses penandaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan dengan mengidentifikasi anggaran untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting baik intervensi spesifik, intervensi sensitif, kegiatan bersifat dukungan dan koordinasi. Penandaan anggaran tematik stunting selaras dengan PMK Nomor 142/PMK.02/2018 yang memberikan mandat kepada K/L untuk melakukan penandaan output ke dalam beberapa tematik APBN. termasuk tema upaya konvergensi penanganan stunting.

Penandaan anggaran tematik stunting bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dan menghitung alokasi anggaran yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Selain itu, penandaan juga dilakukan untuk memastikan dan mengadvokasi K/L, intervensi penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi di lokasi prioritas dan menyasar sasaran prioritas. Penandaan anggaran tematik stunting dilakukan pada belanja K/L dalam APBN.

a. Realisasi Anggaran Pada Tingkat Rincian Output

Realisasi anggaran pada tingkat output dilakukan untuk melihat alokasi pagu awal dan pagu revisi terhadap realisasi anggarannya pada level RO. Pagu awal dan Pagu Revisi pada level RO merupakan total anggaran dari seluruh komponen dan sub-komponen yang ada di dalam RO tersebut, dan akan terlihat overestimate jika dibandingkan analisis pada level analisis lanjutan yang total anggarannya telah dilakukan analisis pada komponen/sub-komponen yang hanya terkait dengan penurunan stunting. Analisis pada level output ini bertujuan untuk melihat perbaikan yang dilakukan oleh K/L dalam upaya mempertajam RO tersebut yang terkait dengan penurunan stunting. Pada level RO, realisasi anggaran program percepatan penurunan stunting pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 mencapai Rp182.017.073.349 yaitu 84,13% dari alokasi sebesar Rp216.349.213.000.



Tabel 59

Alokasi dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting per Jenis Intervensi di Tingkat Rincian Output Tahun 2024

No.	PROGRAM/KEGIATAN/RO/KOMPONEN		DI TINGKAT OUTPUT (RO)		
	Jenis Intervensi	RO	Alokasi	Realisasi	%
1	Intervensi Dukungan	Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (LP-4)	214.997.291.000	180.857.501.132	84,12%
2	Intervensi Dukungan	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Stunting (LP-4)	1.351.922.000	1.159.572.217	85,77%
Total			216.349.213.000	182.017.073.349	84,13%

b. Realisasi Anggaran dan Capaian Output pada Level Analisis Lanjutan

Anggaran dan Capaian Output pada Level Analisis Lanjutan. realisasi anggaran program percepatan penurunan stunting pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 mencapai Rp182.017.073.349 yaitu 84,13% dari alokasi sebesar Rp216.349.213.000.

Tabel 60

Alokasi dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting per Jenis Intervensi Level Analisis Lanjutan Tahun 2024

No.	PROGRAM/KEGIATAN/RO/KOMPONEN		DI TINGKAT OUTPUT (RO)		
	Jenis Intervensi	RO	Alokasi	Realisasi	%
1	Intervensi Dukungan	Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (LP-4)	214.997.291.000	180.857.501.132	84,12%
2	Intervensi Dukungan	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Stunting (LP-4)	1.351.922.000	1.159.572.217	85,77%
Total			216.349.213.000	182.017.073.349	84,13%



LAMPIRAN

Lampiran-lampiran untuk mendukung Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2024:

1. Neraca Percobaan Kas
2. Neraca Percobaan Akrual
3. Neraca
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Akun
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
10. Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel
11. Laporan Barang Aset Tak Berwujud
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel)
13. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
14. Daftar Hak Cipta
15. Daftar Paten
16. Daftar Transfer Masuk
17. Daftar Transfer Keluar
18. Daftar Pengesahan Hibah
19. Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
20. Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/09/2024 tentang UAPPA/B-E1 Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan TA 2024

LAMPIRAN

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Laporan Keuangan
TA 2024 Audited

Lampiran 1

Neraca Percobaan Kas

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM
 Halaman : 1
 lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	395,846,782,365
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	645,889,853	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	4,073,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	179,352,520
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	52,780,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	11,315,142
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	125,791,992
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,080,667
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	204,725,094
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,770,938
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,168,145,553	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	149,906,550	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	52,760,640	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	277,148,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,014,862,650	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,883,398,702	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,171,624,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,328,880,813	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,235,925,536	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	8,550,728,651	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	103,598,209	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	744,745,470	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	69,894,300	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	3,500,227,160	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,083,649,679	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,565,315,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	189,382,975,160	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,909,079,279	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	778,506,653	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	218,076,705	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,663,190,058	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,126,024,001	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,247,602,336	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32,626,026,237	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	11,810,503,495	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	11,651,604,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,799,659,773	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM
 Halaman : 2
 lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,091,830,868	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	47,492,460	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	54,630,272
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,462,375,686
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,320,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	8,746,147
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	44,951,289
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	13,993,796
3.1	526312	Pengembalian Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	820,582,383
JUMLAH			398,899,271,791	398,899,271,791

Keterangan :

FINAL

Lampiran 2

Neraca Percobaan Akrual

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM
 Halaman : 1
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	793,600,400	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	340,661,704	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,078,713,242	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	127,176,500	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	4,650,900	0
0.0	131111	Tanah	79,836,993,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	266,906,137,616	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	194,998,359,440	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,438,174,000	0
0.0	134112	Irigasi	101,248,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,219,628,695	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,842,292,125	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	236,485,993,604
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	59,204,662,371
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,278,062,695
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	58,194,174
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,108,446,928
0.0	162121	Hak Cipta	13,300,000	0
0.0	162141	Paten	14,075,000	0
0.0	162151	Software	1,840,841,251	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	59,173,642,012	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,188,658,214	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	15,140,360,434
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	1,061,039
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	7,320,625
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,701,381,793
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	728,813,471
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	16,570,084,613
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	393,880,261,855
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	645,889,853	0
0.0	313211	Transfer Keluar	521,935,358,576	0
0.0	391111	Ekuitas	0	788,706,632,434
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	642,827,987
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	72,817,943,247
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	277,321,490	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	4,073,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	179,352,520
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	52,780,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM
 Halaman : 2
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	11,315,142
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	394,828,272
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,080,667
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	204,725,094
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	4,000,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	21,168,145,553	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	149,906,550	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	52,760,640	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	277,148,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,014,862,650	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,883,398,702	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,171,624,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	22,332,880,813	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	9,275,805,947	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	101,365,719	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	738,841,570	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	69,894,300	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	3,500,227,160	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,083,649,679	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,565,315,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	216,505,288,336	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,909,079,279	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	778,506,653	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	218,076,705	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31,200,814,372	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,124,704,001	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,101,336,189	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32,654,594,948	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	11,796,509,699	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	10,831,021,617	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14,298,006,202	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,710,325,821	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	40,027,826	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,059,024	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,699,327	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	210,042	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	918,125	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM
 Halaman : 3
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	183,914,733	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	17,508,210	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,630,116,694	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,004,133,717	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	6,537,644	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,265,000	0
JUMLAH			1,589,185,202,465	1,589,185,202,465

Keterangan :

FINAL

Lampiran 3

Neraca

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

NERACA

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	793,600,400	0	793,600,400	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	10,079,242	(10,079,242)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	340,661,704	71,625,424	269,036,280	375.62
Persediaan	1,210,540,642	16,656,027,345	(15,445,486,703)	(92.73)
JUMLAH ASET LANCAR	2,344,802,746	16,737,732,011	(14,392,929,265)	(85.99)
ASET TETAP				
Tanah	79,836,993,000	151,693,237,600	(71,856,244,600)	(47.37)
Peralatan dan Mesin	266,906,137,616	716,591,283,227	(449,685,145,611)	(62.75)
Gedung dan Bangunan	194,998,359,440	461,039,419,392	(266,041,059,952)	(57.70)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,759,050,695	15,062,080,161	(12,303,029,466)	(81.68)
Aset Tetap Lainnya	4,842,292,125	7,361,968,466	(2,519,676,341)	(34.23)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	14,539,638,284	(14,539,638,284)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(298,135,359,772)	(595,598,605,733)	297,463,245,961	(49.94)
JUMLAH ASET TETAP	251,207,473,104	770,689,021,397	(519,481,548,293)	(67.40)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,868,216,251	5,152,427,417	(3,284,211,166)	(63.74)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	59,173,642,012	9,796,077,610	49,377,564,402	504.05
Aset Lain-lain	15,188,658,214	14,043,875,798	1,144,782,416	8.15
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(16,850,123,891)	(18,753,139,227)	1,903,015,336	(10.15)
JUMLAH ASET LAINNYA	59,380,392,586	10,239,241,598	49,141,150,988	479.93
JUMLAH ASET	312,932,668,436	797,665,995,006	(484,733,326,570)	(60.77)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	17,298,898,084	8,959,362,572	8,339,535,512	93.08
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	17,298,898,084	8,959,362,572	8,339,535,512	93.08
JUMLAH KEWAJIBAN	17,298,898,084	8,959,362,572	8,339,535,512	93.08
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	295,633,770,352	788,706,632,434	(493,072,862,082)	(62.52)
JUMLAH EKUITAS	295,633,770,352	788,706,632,434	(493,072,862,082)	(62.52)
JUMLAH EKUITAS	295,633,770,352	788,706,632,434	(493,072,862,082)	(62.52)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	312,932,668,436	797,665,995,006	(484,733,326,570)	(60.77)

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:47 AM

Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Lampiran 4

Laporan Realisasi Anggaran

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024

ESelon I : BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 11

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:46 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024

ESELON I : BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 11

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:46 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024					2023				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	464,908,773,000	395,846,782,365	(69,061,990,635)	85.15	837,810,082,000	803,385,507,258	(34,424,574,742)	95.89		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :

FINAL

Lampiran 5

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I**

: 024
: 11

**KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 8:48 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	4,073,500	0	4,073,500	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	179,352,520	0	179,352,520	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	52,780,000	0	52,780,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	236,206,020	0	236,206,020	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	11,315,142	0	11,315,142	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	11,315,142	0	11,315,142	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	125,791,992	0	125,791,992	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	125,791,992	0	125,791,992	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,080,667	0	2,080,667	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	204,725,094	0	204,725,094	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,770,938	0	65,770,938	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	272,576,699	0	272,576,699	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	645,889,853	0	645,889,853	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	645,889,853	0	645,889,853	

Lampiran 6

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Akun

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 024
: 11

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 8:48 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	23,833,113,000	21,201,537,000	21,168,145,553	0	21,168,145,553	99.84	33,391,447
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	150,024,000	150,024,000	149,906,550	0	149,906,550	99.92	117,450
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,537,304,000	92,016,000	52,760,640	0	52,760,640	57.34	39,255,360
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	515,976,000	290,220,000	277,148,000	0	277,148,000	95.5	13,072,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	758,432,000	1,015,884,000	1,014,862,650	0	1,014,862,650	99.9	1,021,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	29,794,849,000	22,749,681,000	22,662,823,393	0	22,662,823,393	99.62	86,857,607
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	22,505,185,000	9,252,181,000	7,883,398,702	0	7,883,398,702	85.21	1,368,782,298
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,730,830,000	3,229,700,000	3,171,624,000	0	3,171,624,000	98.2	58,076,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,480,016,000	34,998,729,000	22,328,880,813	0	22,328,880,813	63.8	12,669,848,187
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,604,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	65,718,635,000	47,480,610,000	33,383,903,515	0	33,383,903,515	70.31	14,096,706,485
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,178,457,000	3,284,177,000	3,235,925,536	0	3,235,925,536	98.53	48,251,464
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,178,457,000	3,284,177,000	3,235,925,536	0	3,235,925,536	98.53	48,251,464
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	8,023,086,000	8,578,050,000	8,550,728,651	0	8,550,728,651	99.68	27,321,349
522112	Belanja Langganan Telepon	107,400,000	104,400,000	103,598,209	0	103,598,209	99.23	801,791
522113	Belanja Langganan Air	1,152,516,000	758,994,000	744,745,470	0	744,745,470	98.12	14,248,530
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,600,000	75,600,000	69,894,300	0	69,894,300	92.45	5,705,700
522131	Belanja Jasa Konsultan	840,000,000	3,666,239,000	3,500,227,160	0	3,500,227,160	95.47	166,011,840
522141	Belanja Sewa	2,208,812,000	3,171,556,000	3,083,649,679	0	3,083,649,679	97.23	87,906,321
522151	Belanja Jasa Profesi	7,511,822,000	4,456,501,000	3,565,315,000	0	3,565,315,000	80	891,186,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	56,493,213,000	214,552,365,000	189,382,975,160	54,630,272	189,328,344,888	88.24	25,224,020,112
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	76,412,449,000	235,363,705,000	209,001,133,629	54,630,272	208,946,503,357	88.78	26,417,201,643
5231	Belanja Pemeliharaan							
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	894,264,000	0	0	0	0	0	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,427,480,000	6,979,521,000	6,909,079,279	0	6,909,079,279	98.99	70,441,721
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	496,315,000	780,359,000	778,506,653	0	778,506,653	99.76	1,852,347
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	269,000,000	218,274,000	218,076,705	0	218,076,705	99.91	197,295
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,087,059,000	7,978,154,000	7,905,662,637	0	7,905,662,637	99.09	72,491,363
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,579,854,000	36,926,721,000	32,663,190,058	1,462,375,686	31,200,814,372	84.49	5,725,906,628
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108,698,581,000	4,478,611,000	3,126,024,001	1,320,000	3,124,704,001	69.77	1,353,906,999

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I**

: 024
: 11

**KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 8:48 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,564,364,000	25,737,964,000	22,247,602,336	8,746,147	22,238,856,189	86.4	3,499,107,811
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59,563,599,000	40,097,655,000	32,626,026,237	44,951,289	32,581,074,948	81.25	7,516,580,052
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	240,406,398,000	107,240,951,000	90,662,842,632	1,517,393,122	89,145,449,510	83.13	18,095,501,490
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	7,249,250,000	12,145,315,000	11,810,503,495	13,993,796	11,796,509,699	97.13	348,805,301
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	7,249,250,000	12,145,315,000	11,810,503,495	13,993,796	11,796,509,699	97.13	348,805,301
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	23,244,745,000	20,649,953,000	11,651,604,000	820,582,383	10,831,021,617	52.45	9,818,931,383
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	23,244,745,000	20,649,953,000	11,651,604,000	820,582,383	10,831,021,617	52.45	9,818,931,383
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	454,091,842,000	456,892,546,000	390,314,398,837	2,406,599,573	387,907,799,264	84.9	68984746736
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,175,610,000	5,837,474,000	5,799,659,773	0	5,799,659,773	99.35	37,814,227
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	6,175,610,000	5,837,474,000	5,799,659,773	0	5,799,659,773	99.35	37,814,227
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,622,300,000	2,131,223,000	2,091,830,868	0	2,091,830,868	98.15	39,392,132
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,622,300,000	2,131,223,000	2,091,830,868	0	2,091,830,868	98.15	39,392,132
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	52,500,000	47,530,000	47,492,460	0	47,492,460	99.92	37,540
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	52,500,000	47,530,000	47,492,460	0	47,492,460	99.92	37,540
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	8,850,410,000	8,016,227,000	7,938,983,101	0	7,938,983,101	99.04	77243899
	JUMLAH BELANJA	462,942,252,000	464,908,773,000	398,253,381,938	2,406,599,573	395,846,782,365	85.15	69,061,990,635

Lampiran 7

Laporan Operasional

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

LAPORAN OPERASIONAL



TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:46 AM
Halaman : 1
lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	410,216,914	4,038,609,585	(3,628,392,671)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	410,216,914	4,038,609,585	(3,628,392,671)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	410,216,914	4,038,609,585	(3,628,392,671)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	0	55,178,270,462	(55,178,270,462)	-
Beban Persediaan	2,636,654,338	67,037,695,959	(64,401,041,621)	-
Beban Barang dan Jasa	292,891,114,619	327,321,384,908	(34,430,270,289)	-
Beban Pemeliharaan	8,909,796,354	32,213,633,764	(23,303,837,410)	-
Beban Perjalanan Dinas	100,877,959,209	335,622,538,660	(234,744,579,451)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	10,831,021,617	24,843,720,677	(14,012,699,060)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 ESELON I : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:46 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	22,260,669,310	68,099,146,182	(45,838,476,872)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	438,407,215,447	910,316,390,612	(471,909,175,165)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(437,996,998,533)	(906,277,781,027)	468,280,782,494	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	230,867,520	(4,547,859,487)	4,778,727,007	-
Pendapatan Pelepasan Aset	232,132,520	269,795,007	(37,662,487)	-
Beban Pelepasan Aset	1,265,000	4,817,654,494	(4,816,389,494)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	210,805,761	(7,405,059,717)	7,615,865,478	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	210,805,761	6,418,512,849	(6,207,707,088)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	13,823,572,566	(13,823,572,566)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	441,673,281	(11,952,919,204)	12,394,592,485	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(437,555,325,252)	(918,230,700,231)	480,675,374,979	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(437,555,325,252)	(918,230,700,231)	480,675,374,979	-

Keterangan :

FINAL

Lampiran 8

Laporan Perubahan Ekuitas

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:46 AM
Halaman : 1
lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	788,706,632,434	1,075,294,180,652	(286,587,548,218)	(26.65)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(437,555,325,252)	(918,230,700,231)	480,675,374,979	(52.35)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	642,827,987	(5,586,059,332)	6,228,887,319	(111.51)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(14,930,000)	14,930,000	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	642,827,987	(5,571,129,332)	6,213,957,319	(111.54)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(56,160,364,817)	637,229,211,345	(693,389,576,162)	(108.81)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(493,072,862,082)	(286,587,548,218)	(206,485,313,864)	72.05
EKUITAS AKHIR	295,633,770,352	788,706,632,434	(493,072,862,082)	(62.52)

Keterangan :

FINAL

Lampiran 9

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSI SI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
 UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl.Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl.Cetak : 07/05/25 8:49 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,078,713,242
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	127,176,500
117199	Persediaan Lainnya	4,650,900
131111	Tanah	79,836,993,000
132111	Peralatan dan Mesin	266,906,137,616
133111	Gedung dan Bangunan	194,998,359,440
134111	Jalan dan Jembatan	1,438,174,000
134112	Irigasi	101,248,000
134113	Jaringan	1,219,628,695
135121	Aset Tetap Lainnya	4,842,292,125
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(236,485,993,604)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(59,204,662,371)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,278,062,695)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(58,194,174)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,108,446,928)
162121	Hak Cipta	13,300,000
162141	Paten	14,075,000
162151	Software	1,840,841,251
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,188,658,214
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(15,140,360,434)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(1,061,039)
169314	Akumulasi Amortisasi Paten	(7,320,625)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,701,381,793)
J U M L A H		252,624,764,320

Lampiran 10

Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
 UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 1:49 AM
 Tanggal : 08/05/25 8:18 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	102,772	151,693,237,600	0	0	82,214	71,856,244,600	20,558	79,836,993,000
20101	TANAH PERSIL	95,047	129,165,383,600	0	0	74,489	49,328,390,600	20,558	79,836,993,000
20102	TANAH NON PERSIL	7,725	22,527,854,000	0	0	7,725	22,527,854,000	0	0
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	46,380	716,591,283,227	517	9,820,228,153	20,714	459,505,373,764	26,183	266,906,137,616
30101	ALAT BESAR DARAT	5	279,950,000	0	0	2	250,800,000	3	29,150,000
30103	ALAT BANTU	42	22,711,580,923	0	0	28	11,858,273,882	14	10,853,307,041
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	131	22,710,712,902	2	546,050,000	76	11,778,684,938	57	11,478,077,964
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	14	32,113,681	3	7,300,000	7	13,630,000	10	25,783,681
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	320,085,636	0	0	20	312,169,422	3	7,916,214
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	41	86,954,325	0	0	37	77,934,280	4	9,020,045
30303	ALAT UKUR	469	5,895,558,921	0	0	301	2,784,228,533	168	3,111,330,388
30401	ALAT PENGOLAHAN	253	1,780,981,046	0	0	216	1,405,840,546	37	375,140,500
30501	ALAT KANTOR	4,765	21,464,767,493	28	334,505,000	1,965	10,677,710,731	2,828	11,121,561,762
30502	ALAT RUMAH TANGGA	13,306	47,004,573,089	278	2,182,327,437	6,172	23,165,733,287	7,412	26,021,167,239
30601	ALAT STUDIO	1,316	10,707,179,425	25	1,290,391,836	885	6,759,479,230	456	5,238,092,031
30602	ALAT KOMUNIKASI	696	2,864,009,073	0	0	564	1,677,500,852	132	1,186,508,221
30603	PERALATAN PEMANCAR	37	7,466,829,890	6	90,500,000	25	4,855,844,190	18	2,701,485,700
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	24	105,440,000	0	0	24	105,440,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	6,194	43,205,757,476	1	115,500,000	1,987	18,517,688,551	4,208	24,803,568,925
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	4,848	7,850,156,680	0	0	50	265,168,933	4,798	7,584,987,747
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8,276	411,574,147,873	26	1,328,859,130	5,887	308,767,159,264	2,415	104,135,847,739
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	545	28,584,025,091	0	1,833,566,000	387	19,871,187,407	158	10,546,403,684
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	272	3,241,951,394	0	0	104	1,843,032,700	168	1,398,918,694
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	9	6,438,766,740	0	0	4	228,388,720	5	6,210,378,020
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	3	68,533,165	0	0	1	7,274,000	2	61,259,165
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	180	14,059,017,806	0	0	146	9,186,741,083	34	4,872,276,723
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	1,056,427,710	0	0	14	1,050,712,000	1	5,715,710
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	99	4,089,785,955	0	0	83	2,914,510,180	16	1,175,275,775
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	3	131,500,000	0	0	3	131,500,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	2,363	29,106,962,558	69	1,351,161,250	755	10,902,642,957	1,677	19,555,480,851
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,823	13,191,458,439	54	324,047,500	783	4,034,919,012	1,094	9,480,586,927
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	3	10,357,000	0	0	1	5,000,000	2	5,357,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1	147,989,600	0	0	1	147,989,600	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	SUMUR	1	158,000,000	0	0	1	158,000,000	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESelon I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
 UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 1:49 AM
 Tanggal : 08/05/25 8:18 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31501	ALAT DETEKSI	3	846,400,000	0	0	1	710,000,000	2	136,400,000
31502	ALAT PELINDUNG	4	15,598,000	0	0	0	0	4	15,598,000
31503	ALAT SAR	44	130,538,800	0	0	37	120,638,800	7	9,900,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	142	5,813,842,286	0	0	76	2,719,714,716	66	3,094,127,570
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	28	55,945,400	0	0	21	49,510,400	7	6,435,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	393	3,369,356,850	0	0	42	2,141,297,550	351	1,228,059,300
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9	14,028,000	25	416,020,000	8	9,028,000	26	421,020,000
133111	Gedung dan Bangunan	193	461,039,419,392	3	27,667,183,616	156	293,708,243,568	40	194,998,359,440
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	126	427,908,472,592	3	27,667,183,616	99	276,784,780,768	30	178,790,875,440
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	46	26,772,680,800	0	0	38	12,855,007,800	8	13,917,673,000
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	0	0	0	0	0	0	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	21	6,358,266,000	0	0	19	4,068,455,000	2	2,289,811,000
134111	Jalan dan Jembatan	13,026	5,119,095,600	0	0	8,421	3,680,921,600	4,605	1,438,174,000
50101	JALAN	12,879	4,386,146,600	0	0	8,379	3,408,292,600	4,500	977,854,000
50102	JEMBATAN	147	732,949,000	0	0	42	272,629,000	105	460,320,000
134112	Irigasi	27	3,005,320,000	0	0	22	2,904,072,000	5	101,248,000
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	3	42,527,000	0	0	2	15,573,000	1	26,954,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	92,318,000	0	0	1	92,318,000	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	171,337,000	0	0	1	171,337,000	0	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	5	440,201,000	0	0	4	438,739,000	1	1,462,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	14	773,005,000	0	0	11	700,173,000	3	72,832,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	3	1,485,932,000	0	0	3	1,485,932,000	0	0
134113	Jaringan	46	6,937,664,561	0	0	40	5,718,035,866	6	1,219,628,695
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	10	1,033,845,749	0	0	10	1,033,845,749	0	0
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	21,000,000	0	0	1	21,000,000	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	630,416,860	0	0	3	470,713,860	1	159,703,000
50308	INSTALASI GAS	2	5,708,270	0	0	0	0	2	5,708,270
50310	INSTALASI LAIN	4	1,167,796,375	0	0	2	134,238,000	2	1,033,558,375
50401	JARINGAN AIR MINUM	2	46,700,000	0	0	2	46,700,000	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	20	3,943,100,307	0	0	19	3,922,441,257	1	20,659,050
50403	JARINGAN TELEPON	3	89,097,000	0	0	3	89,097,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	27,754	7,361,968,466	108	47,492,460	6,647	2,567,168,801	21,215	4,842,292,125
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	27,575	6,519,624,517	108	47,492,460	6,476	1,851,244,352	21,207	4,715,872,625
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	159	193,056,484	0	0	155	177,412,484	4	15,644,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 1:49 AM
Tanggal : 08/05/25 8:18 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 1:49 AM
 Tanggal : 08/05/25 8:18 AM
 Halaman : 4
 Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,365,600,922,395			46,392,554,233			847,461,985,538
									564,531,491,090

Lampiran 11

Laporan Barang Aset Tak Berwujud

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
 UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 1:49 AM
 Tanggal : 08/05/25 8:20 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162121	Hak Cipta	125	26,900,000	0	0	64	13,600,000	61	13,300,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	125	26,900,000	0	0	64	13,600,000	61	13,300,000
162141	Paten	9	25,650,000	0	0	4	11,575,000	5	14,075,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	9	25,650,000	0	0	4	11,575,000	5	14,075,000
162151	Software	125	5,099,877,417	0	0	80	3,259,036,166	45	1,840,841,251
80101	ASET TAK BERWUJUD	125	5,099,877,417	0	0	80	3,259,036,166	45	1,840,841,251
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17	190,942,249	48	1,012,635,000	65	1,203,577,249	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	17	190,942,249	48	1,012,635,000	65	1,203,577,249	0	0
TOTAL			5,343,369,666		1,012,635,000		4,487,788,415		1,868,216,251

Lampiran 12

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel)

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPP : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 416151 KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 9:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						NILAI BUKU		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN						
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8			
131111	Tanah		20,558	79,836,993,000	0	0	0	0	79,836,993,000		
20101	TANAH PERSIL	-	20,558	79,836,993,000	0	0	0	0	79,836,993,000		
132111	Peralatan dan Mesin		26,183	266,906,137,616	(333,161,173,782)	96,675,180,178	(236,485,993,604)	30,420,144,012			
30101	ALAT BESAR DARAT	-	3	29,150,000	(234,850,000)	205,700,000	(29,150,000)	0	0		
30103	ALAT BANTU	-	14	10,853,307,041	(14,350,121,474)	4,397,916,829	(9,952,204,645)	901,102,396			
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	57	11,478,077,964	(10,109,700,129)	695,382,872	(9,414,317,257)	2,063,760,707			
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	10	25,783,681	(18,483,681)	(1,825,000)	(20,308,681)	5,475,000			
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	3	7,916,214	(7,457,244)	(321,140)	(7,778,384)	137,830			
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	9,020,045	(18,012,545)	8,992,500	(9,020,045)	0			
30303	ALAT UKUR	-	168	3,111,330,388	(3,445,645,480)	418,189,092	(3,027,456,388)	83,874,000			
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	37	375,140,500	(664,858,940)	289,718,440	(375,140,500)	0			
30501	ALAT KANTOR	-	2,828	11,121,561,762	(11,408,367,315)	961,845,140	(10,446,522,175)	675,039,587			
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	7,412	26,021,167,239	(22,863,048,553)	1,326,277,609	(21,536,770,944)	4,484,396,295			
30601	ALAT STUDIO	-	456	5,238,092,031	(4,133,785,089)	305,408,482	(3,828,376,607)	1,409,715,424			
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	132	1,186,508,221	(1,183,037,096)	54,683,950	(1,128,353,146)	58,155,075			
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	18	2,701,485,700	(2,466,388,815)	(132,329,830)	(2,598,718,645)	102,767,055			
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	0	0	(14,446,672)	14,446,672	0	0			
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	4,208	24,803,568,925	(26,953,288,634)	6,635,310,298	(20,317,978,336)	4,485,590,589			
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	4,798	7,584,987,747	(4,424,742,265)	(1,079,687,850)	(5,504,430,115)	2,080,557,632			
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2,415	104,135,847,739	(170,017,872,818)	72,431,086,383	(97,586,786,435)	6,549,061,304			
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	158	10,546,403,684	(11,679,922,807)	3,408,440,714	(8,271,482,093)	2,274,921,591			
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	168	1,398,918,694	(989,316,563)	60,807,418	(928,509,145)	470,409,549			
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	5	6,210,378,020	(6,212,505,940)	2,127,920	(6,210,378,020)	0			
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	-	2	61,259,165	(45,944,376)	(6,125,916)	(52,070,292)	9,188,873			
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	34	4,872,276,723	(6,666,757,562)	2,132,556,566	(4,534,200,996)	338,075,727			
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	5,715,710	(595,027,045)	590,263,952	(4,763,093)	952,617			
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	16	1,175,275,775	(1,344,373,125)	176,822,500	(1,167,550,625)	7,725,150			
31001	KOMPUTER UNIT	-	1,677	19,555,480,851	(18,137,830,800)	1,596,727,747	(16,541,103,053)	3,014,377,798			
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1,094	9,480,586,927	(8,688,274,611)	65,939,842	(8,622,334,769)	858,252,158			
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	2	5,357,000	(5,357,000)	0	(5,357,000)	0			
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	0	0	(125,791,160)	125,791,160	0	0			
31501	ALAT DETEKSI	-	2	136,400,000	(791,840,000)	682,720,000	(109,120,000)	27,280,000			
31502	ALAT PELENDUNG	-	4	15,598,000	(15,598,000)	0	(15,598,000)	0			
31503	ALAT SAR	-	7	9,900,000	(13,200,000)	3,300,000	(9,900,000)	0			
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	66	3,094,127,570	(3,944,343,420)	893,962,670	(3,050,380,750)	43,746,820			
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	7	6,435,000	(6,113,250)	(321,750)	(6,435,000)	0			
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	351	1,228,059,300	(1,579,288,373)	480,126,573	(1,099,161,800)	128,897,500			

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPP : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 416151 KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 9:18 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	26	421,020,000	(5,583,000)	(68,753,665)	(74,336,665)	346,683,335	
133111	Gedung dan Bangunan		40	194,998,359,440	(63,119,440,393)	3,914,778,022	(59,204,662,371)	135,793,697,069	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	30	178,790,875,440	(58,110,936,497)	4,552,229,503	(53,558,706,994)	125,232,168,446	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	8	13,917,673,000	(3,865,254,853)	(434,940,338)	(4,300,195,191)	9,617,477,809	
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	2,289,811,000	(1,143,249,043)	(202,511,143)	(1,345,760,186)	944,050,814	
134111	Jalan dan Jembatan		4,605	1,438,174,000	(1,238,034,869)	(40,027,826)	(1,278,062,695)	160,111,305	
50101	JALAN	-	4,500	977,854,000	(977,854,000)	0	(977,854,000)	0	
50102	JEMBATAN	-	105	460,320,000	(260,180,869)	(40,027,826)	(300,208,695)	160,111,305	
134112	Irigasi		5	101,248,000	(53,135,150)	(5,059,024)	(58,194,174)	43,053,826	
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	1	26,954,000	(3,878,180)	(668,864)	(4,547,044)	22,406,956	
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	-	1	1,462,000	(575,939)	(88,606)	(664,545)	797,455	
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	3	72,832,000	(48,681,031)	(4,301,554)	(52,982,585)	19,849,415	
134113	Jaringan		6	1,219,628,695	(1,103,747,601)	(4,699,327)	(1,108,446,928)	111,181,767	
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	159,703,000	(61,884,913)	(3,992,575)	(65,877,488)	93,825,512	
50308	INSTALASI GAS	-	2	5,708,270	(3,139,553)	(190,276)	(3,329,829)	2,378,441	
50310	INSTALASI LAIN	-	2	1,033,558,375	(1,033,558,375)	0	(1,033,558,375)	0	
50402	JARINGAN LISTRIK	-	1	20,659,050	(5,164,760)	(516,476)	(5,681,236)	14,977,814	
135121	Aset Tetap Lainnya		21,215	4,842,292,125	0	0	0	4,842,292,125	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	21,207	4,715,872,625	0	0	0	4,715,872,625	
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	4	15,644,000	0	0	0	15,644,000	
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	2	10,730,500	0	0	0	10,730,500	
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	2	100,045,000	0	0	0	100,045,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2,087	15,188,658,214	(10,668,132,915)	(4,472,227,519)	(15,140,360,434)	48,297,780	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	22	1,809,047,552	(937,421,600)	(871,625,952)	(1,809,047,552)	0	
30303	ALAT UKUR	-	16	62,250,400	0	(62,250,400)	(62,250,400)	0	
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	40,625,500	0	(40,625,500)	(40,625,500)	0	
30501	ALAT KANTOR	-	90	439,569,800	(74,643,980)	(364,925,820)	(439,569,800)	0	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	250	540,666,790	(56,000)	(540,610,790)	(540,666,790)	0	
30601	ALAT STUDIO	-	56	102,404,200	0	(102,404,200)	(102,404,200)	0	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	310	156,332,000	(144,232,000)	(12,100,000)	(156,332,000)	0	
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	2,300,000	0	(2,300,000)	(2,300,000)	0	
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	4	18,700,000	0	(15,693,338)	(15,693,338)	3,006,662	
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	375	617,994,722	(143,000,000)	(474,994,722)	(617,994,722)	0	
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	2	600,000	0	(600,000)	(600,000)	0	
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	101	917,839,600	(59,712,500)	(849,244,600)	(908,957,100)	8,882,500	
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	19	431,322,000	0	(431,322,000)	(431,322,000)	0	
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	4	14,700,000	0	(8,516,007)	(8,516,007)	6,183,993	

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPP : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 416151 KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 9:18 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	1	257,000	0	(257,000)	(257,000)	0	
31001	KOMPUTER UNIT	-	820	9,989,148,169	(9,309,066,835)	(652,219,209)	(9,961,286,044)	27,862,125	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	5	10,900,000	0	(8,537,500)	(8,537,500)	2,362,500	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	6,668,481	0	(6,668,481)	(6,668,481)	0	
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	3	26,749,000	0	(26,749,000)	(26,749,000)	0	
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	583,000	0	(583,000)	(583,000)	0	
JUMLAH			74,699	564,531,491,090	(409,343,664,710)	96,067,944,504	(313,275,720,206)	251,255,770,884	

Lampiran 13

Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 024

UAPPB-E1 : 11

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tanggal : 07/05/25 8:50 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162121	Hak Cipta		61	13,300,000	(1,731,009)	669,970	(1,061,039)	12,238,961
80101	ASET TAK BERWUJUD		61	13,300,000	(1,731,009)	669,970	(1,061,039)	12,238,961
162141	Paten		5	14,075,000	(9,318,750)	1,998,125	(7,320,625)	6,754,375
80101	ASET TAK BERWUJUD		5	14,075,000	(9,318,750)	1,998,125	(7,320,625)	6,754,375
162151	Software		45	1,840,841,251	(4,773,753,226)	3,072,371,433	(1,701,381,793)	139,459,458
80101	ASET TAK BERWUJUD		45	1,840,841,251	(4,773,753,226)	3,072,371,433	(1,701,381,793)	139,459,458
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		0	0	(190,942,249)	190,942,249	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		0	0	(190,942,249)	190,942,249	0	0
JUMLAH			111	1,868,216,251	(4,975,745,234)	3,265,981,777	(1,709,763,457)	158,452,794

Lampiran 14

Daftar Hak Cipta

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

Daftar Hak Cipta
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No.	Judul Ciptaan	Pencipta	Nomor	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Jenis Ciptaan	Nilai
	Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan						
1	Buku IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)	Trihono dkk	C00201102682	08 Juli 2011	50 Tahun	Buku	Rp 200.000
2	Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif	Julianti Pradono, Rachmalina S., Nunik Kusumawardani, Kasnodihardjo (4 org)	EC00201976720	01 Desember 2019		Buku	Rp 200.000
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2013	Dwi Hapsari Tjandrarini, dkk (18 org)	EC00201989842	01 Desember 2019		Buku	Rp 200.000
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018	Dwi Hapsari Tjandrarini, dkk (11 org)	EC00201989848	01 Desember 2019		Buku	Rp 200.000
5	Panduan Manajemen Penelitian Kuantitatif	Prof. Dr. dr. Julianty Pradono, MS., SPOK. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarso, MS. Prof. Dr. Drs. Soedibyo Soepardi, Apt., M.Kes. Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM., M.Kes.	000188955	03 Juni 2020		Buku Panduan/Petunjuk	Rp 200.000
6	Ayo Hidup Sehat (Cegah TBC)	Windadari Murni Hartini, SKM., MPH. Ismiyati, S.Si., M.Sc., Apt. (Poltekkes Bhakti Setya Indonesia)	000207576	23 September 2020		Lagu (Musik Dengan Teks)	Rp 200.000
7	Pengembangan Model Kartu Elektronik (e-D2P2s) Deteksi Dini Ibu Hamil Resiko Persalinan Prematur Spontan (28-<37 Minggu)	Sriyana Herman, AMK., SKM., M.Kes. Dkk (Institut Teknologi Kesehatan Avicenna-Sulteng)	000206571	02 Oktober 2020		Program Komputer	Rp 300.000
8	Pendetksi Henti Jantung	Purbianto, M.Kep., Sp.KMB. , Dwi Agustanti, M.Kep., Sp.Kom.(Politeknik Kesehatan Tanjungkarang)	000206572	25 September 2020		Program Komputer	Rp 300.000
9	Alat Irrigasi Luka	Ns. Ahmad Ikhlasul Amal, MAN. Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB. (Unissula Semarang)	000204193	16 September 2020		Alat / TTG	Rp 200.000
10	Buku Saku Kedaruratan Gizi Balita Pascabencana - Untuk Petugas Puskesmas	Dr. Ir. Umi Fahmida, M.Sc. Dkk (SEAMEO REFCON)	000204908	16 September 2020		Buku Saku	Rp 200.000

Daftar Hak Cipta
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No.	Judul Ciptaan	Pencipta	Nomor	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Jenis Ciptaan	Nilai
11	Sistem Informasi Pendukung keputusan penjarigan suspek dan pemantauan TB berbasis wilayah desa (https://sifo-dss-tb.com/)	Maryani Setyowati, SKM., M.Kes. Dkk (Universitas Dian Nuswantoro)	000213793	21 Oktober 2020		Program komputer	Rp 300.000
12	BiliNorm	Mahendra Tri Arif Sampurna, dr., Sp.A. Dkk (Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga)	000219809	16 November 2020		Program Komputer	Rp 300.000
13	Buku Saku Sayang Emak	Aniesaputri Junita, SKM., MPH dkk (Dinkes Propinsi Riau)	000203755	16 September 2020		Buku Saku	Rp 200.000
14	Modul Modifikasi Oyog (Edukasi Tanda Bahaya Kehamilan)	Suratmi, S.ST, M.Keb. Dkk (Poltekkes Tasikmalaya)	EC00202035739	25 September 2020		Buku	Rp 200.000
15	Formulasi COOKIES IKAN GABUS bagi ibu hamil Trimester II untuk menurunkan angka IUGR (Intrauterine Growth Restriction) dan BBLR (Bayi Lahir Bawal)	Dr. dr. Eugenius Phyowai Ganap, Sp.OG (K) dkk (FKKM UGM)	000205546	08 Desember 2020		Resep / Formula cookies	Rp 200.000
16	PedsQi Neuromuscular Module versi Bahasa Indonesia	Dr.Guswan Wiwaha,dr, MM dkk (4 orang) (Univ.Padjajaran)	000226266	12 November 2020		Karya Tulis	Rp 200.000
17	Aplikasi Lintas Lacak Informasi Talasemia	Dr. Susi Susanah, dr., SpA (K). (RSUP Hasan Sadikin Bandung)	000237140	03 Februari 2021		Program Komputer	Rp 300.000
18	Pengembangan Aplikasi Global Trigger Tool Untuk Pelayanan Rawat Jalan: Studi Di Empat Puskesmas Di Jawa Timur	Inge Dhamanti, SKM., M.Kes., M.PH., Ph.D , dkk (FKM Univ. Airlangga)	00238344	16 Februari 2021		Karya Tulis	Rp 200.000
19	Evaluasi Kesesuaian Peresepan Antibiotik Menggunakan Perangkat Lunak Online Sebagai Bagian dari Antimicrobial Stewardship Program	dr. Ayodhia Pitaloka MKed (Ped), SpA, Ph.D, dkk (RSUP Adam Malik)	00238841	22 Februari 2021		Program Komputer	Rp 300.000
20	Perangkat Lunak Pengklasifikasi Eritrosit Pada Citra Lapang Pandang Preparat Darah Kering Pada Kasus Talasemia	Dr. Dyah Aruming Tyas, S.Si , dkk(FKKMK UGM)	000240421	22 Februari 2021		Program Komputer	Rp 300.000
21	PhotoInMeter: Program untuk Pengukuran Intensitas Lampu Fototerapi	Dr. Yosi Kristian, S.Kom, M.Kom dkk (ISTTS Surabaya)	000240420	26 Februari 2021		Program Komputer	Rp 300.000

Daftar Hak Cipta
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No.	Judul Ciptaan	Pencipta	Nomor	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Jenis Ciptaan	Nilai
22	PEMBUATAN BAGEA SASIGO (Bagea Berbahan Dasar Sagu, Tepung Singkong dan Gonad)	Dr. La Banudi, SST, M.Kes, Dr. Nurmiaty, SSiT, MPH (Politeknik Kendari)	000240440	26-02-2021		Buku	Rp 200.000
23	Modul Interprofesional Education (IPE)	Dr. La Banudi, SST, M.Kes, Dr. Nurmiaty, SSiT, MPH (Politeknik Kendari)	000243508	23-03-2021		Modul	Rp 200.000
24	Nutrisi Kehamilan 5 J untuk Ibu Hamil dan Pendamping	Dr. dr. Aria Wibawa, Sp.OG (K)	000294307	16 November 2021		Buku Panduan	Rp 200.000
25	Nutrisi Kehamilan 5 J untuk Tenaga Kesehatan	Dr. dr. Aria Wibawa, Sp.OG (K)	000304171	16 November 2021		Buku Panduan	Rp 200.000
26	Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Bidang Kesehatan pada Era Pandemi Covid-19	Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, SKM., M.Kes, dkk	000308510	14 Desember 2021		Buku	Rp 200.000
27	Bunga Rampai Uji Klinik	Prof. Dr. dr. Julianty Pradono, MS., SPOK, dkk	000308846	14 Desember 2021		Buku	Rp 200.000
28	Kemandirian Bahan Baku Obat Malaria Dihidroartemisinin (DHA)	Ani Isnawati, dkk	000281634	15 Oktober 2021		Buku	Rp 200.000
29	Fact Sheets Lokus Penempatan Nusantara Sehat Tim (NST) Batch XVI	Tinexelly Marisiuli Simamora	000246819	13 April 2021		Buku	Rp 200.000
30	Instrumen Penelitian Riset Evaluatif Pendayagunaan Dokter Spesialis di Indonesia	Mujati, SKM, M.Kes ,dkk	000308373	22 Desember 2021		Karya Tulis	Rp 200.000
31	Quality in Out-Patient Unit at Private Hospitals Providing the National Health Insurance (NHI) <i>Evaluation of Physician and Pharmacy Services</i>	Syachroni, S.Si., M.Kes	000308372	22 Desember 2021		Jurnal	Rp 200.000

Daftar Hak Cipta
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No.	Judul Ciptaan	Pencipta	Nomor	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Jenis Ciptaan	Nilai
32	First envenomation report of the Cnidarian Physalia physalis in Indonesia	Dr. dr. Tri Maharani, M.Si., SpEM	000308371	22 Desember 2021		Jurnal	Rp 200.000
33	WILDCRINE MANAGEMENT IN DISTRICTS AND PRIMARY HEALTH CARE CENTRES (PHC) IN THE NATIONAL HEALTH INSURANCE (JKN) PROGRAMME	Dr. Dra. Raharni, Apt., M.Kes	000308370	22 Desember 2021		Jurnal	Rp 200.000
34	Transformasi 10 Tahun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Indonesia	Rofingatul Mubasyiroh, SKM, M.Epid, dkk	000271135	08 September 2021		Buku	Rp 200.000
35	Laboratorium Manajemen Data: Jejak Langkah Membangun Kualitas Data Optimalkan Manfaat	Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes	000278320	08 September 2021		Buku	Rp 200.000
36	Indeks Water Sanitation Hygiene (Wash) Indonesia	Puti Sari Hidayangsih, SKM, M.Sc.PH	000294280	09 November 2021		Buku	Rp 200.000
37	Baram, Antara Madu dan Racun dalam kehidupan Etnik Dayak Ngaju	dr. Tety Rachmawati, M.Si, dkk	000253200	10 Juni 2021		Buku	Rp 200.000
38	Buku Lembar Balik Ken Ineh si Bebeden Jeroh	Prof. Dr. drg. Niniek Lely Pratiwi, M.Kes , dkk	000258508	02 Juli 2021		Buku	Rp 200.000
39	Tengger Bertahan Dalam Adat: Studi Konstruksi Sosial Ukuran Keluarga Suku Tengger	Dr. Agung Dwi Laksono, SKM, M.Kes	000279691	15 Oktober 2021		Buku	Rp 200.000
40	Rebranding dan Perencanaan Revitalisasi Museum Kesehatan dr.Adhyatma, MPH., dan Wisata Ilmiah di Bidang Kesehatan	Yunita Fitrianti, S.Ant, M.Sc dkk	000301695	08 Desember 2021		Booklet	Rp 200.000
41	Pengembangan Metode Diagnostik Cepat Laboratorium untuk Identifikasi Penyebab Difteri	Sunarno, Noer Endah Pracoyo, Kambang Sariadji, Rudi Hendro Putranto	EC00201986828	01 Desember 2019		Buku	Rp 200.000

Daftar Hak Cipta
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No.	Judul Ciptaan	Pencipta	Nomor	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Jenis Ciptaan	Nilai
42	Peluang Generasi Bangsa Yang Terabaikan "Anemia Baduta"	Fitrah Ernawati, Yessi Octaria, Ali Khomsan	EC00201986858	01 Desember 2019		Buku	Rp 200.000
43	Primer Set Complete Coding Sequence of HA and NA genes of Influenza A/H3N2 Virus	Agustiningsih, M.Biomed.Sc., Dr. dr. Vivi Setyawaty, M.Biomed.	000188953	03 Juni 2020		Artikel / Publikasi Online	Rp 200.000
44	Kendali Difteri, Kunci Sukses Negeri Kajian Penyakit Difteri di Lapangan	Kambang Sariadji, Ssi, M.Biomed dkk	000188952	03 Juni 2020		Buku	Rp 200.000
45	Corynebacterium diphtheriae Diagnosis Laboratorium Bakteriologi	drg.Rudi Hendro Putranto, M.Si dkk (4 orang)	000222239	23 November 2020		Buku	Rp 200.000
46	Pedoman Biorisiko Laboratorium Institusi (Institution Biorisk Laboratory Manual)	Ida Susanti dkk (8 orang)	000220560	23 November 2020		Buku	Rp 200.000
47	Genetic analysis of the complete genome of influenza A (H1N1) pdm09 during the first wave of pandemic season in Indonesia	Hana Apsari Pawestri dkk (7 orang)	000221570	25 November 2020		Jurnal	Rp 200.000
48	Kumpulan Poster Keluarga sadar gizi (Kadarzi)	Hermina dkk	C00201403505	11 September 2014	50 Tahun	Poster	Rp 200.000
49	Alat Peraga "Sediaan Darah Malaria terstandar untuk Pendidikan, Pelatihan dan Menjaga Kualitas Diagnosis Mikroskopis"	Basundari Sri Utami	C00201403506	11 September 2014	50 Tahun	Slide/ Sediaan Darah Malaria	Rp 200.000
50	Game play hidupku sehat, makan sehat, beraktifitas sehat	Hermina dkk	C00201403507	11 September 2014	50 Tahun	CD	Rp 300.000
51	Buku Foto Makanan (survei konsumsi Makanan Individu) (SKMI - 2014)	Sri Prehartini dkk	C00201501882	23 Juni 2013	50 Tahun	Buku	Rp 200.000

Daftar Hak Cipta
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No.	Judul Ciptaan	Pencipta	Nomor	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Jenis Ciptaan	Nilai
52	Pedoman Validasi Lokus Nusantara Sehat (NS)	drg.Rudi Hendro Putranto, M.Si dkk (6 orang)	000202855	15 September 2020		Buku	Rp 200.000
53	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Nusantara Sehat	Dr.dr Harimat Hendarwan, M,Kes, dkk (8 org)	000202854	15 September 2020		Buku	Rp 200.000
54	Kumpulan Fact Sheet Study Validasi Lokus Penempatan Tim Nusantara Sehat Tahun 2019	drg.Rudi Hendro Putranto, M.Si dkk (5 orang)	EC00202036822	6 Juli 2020		Buku	Rp 200.000
55	Fact Sheet Lokus Nusantara Sehat Tim Batch XIV	Tinexcelly Marisiuli Simamora, SKM, MKM dkk	000219598	12 Nopember 2020		Buku	Rp 200.000
56	Fact Sheets Lokus Penempatan Nusantara Sehat Tim Batch XV Tahun 2020	Tinexcelly Marisiuli Simamora, SKM, MKM dkk	000196159	12 Nopember 2020		Buku	Rp 200.000
57	Program Komputer "SISTEM APLIKASI E-RISET VERSI 1.0"	Rianto Purnama dkk	C00201702271	31 Mei 2017	50 Tahun	Program Komputer	Rp 300.000
58	Program Komputer "APLIKASI MOBILE BALITA SEHAT"	Nur Handayani Utami	C00201706083	21 Desember 2017	50 Tahun	Program Komputer	Rp 300.000
59	Hipertensi Pada Wanita Menopause	Dr. Dra. Woro Riyadina, M.Kes.	000225824	25 Juni 2020		Buku	Rp 200.000
60	Rekam Jejak Studi Kohor Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Kota Bogor	Dr. Dra. Woro Riyadina, M.Kes.	000225824	12 Desember 2020		Buku	Rp 200.000
61	Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan pada Ibadah Umrah	Rustika, Dede Anwar Musadad,Tety Rachmawati, Herti Windya Puspasari, Asep Kusnali, Primasari Syam, ratih Oemiyati (7 org)	EC00201950507	01 Desember 2019		Buku	Rp 200.000
	JUMLAH						Rp 13.300.000

Lampiran 15

Daftar Paten

Daftar Paten
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Per-31 Desember 2024

No	Nama Penelitian/ Paten	Nama Inventor/Satker	Nomor Paten/ Kode Barang	Tahun Terbit Paten	Nilai Paten
Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan					
1	Proses Isolasi Galaktomanan Dari Ampas Kelapa	Suryana Purawisastra , Satker : Pusat 1 (PBTDK)	IDP000022445	05 Dec 2008	Rp 2.575.000
2	Alat Penangkap Residu Pestisida Yang Terhirup Oleh Manusia Dalam Ruangan	Ani Isnawati, Mariana Raini, Satker : Pusat 1 (PBTDK)	IDP000036485	14 Aug 2014	Rp 2.825.000
3	Komposisi Herbal Untuk Afrodisiaka	Yun Astuti Nugroho , Satker : Pusat 1 (PBTDK)	IDP000035231	16 Dec 2013	Rp 2.675.000
4	Primer Spesifik Pada Gen gyr B Untuk Amplifikasi DNA Mycobacterium tuberculosis Pada Proses Sekuensing	Vivi Lisdawati, Satker : Pusat 1 (PBTDK)	IDP000056250	29 Jan 2019	Rp 3.000.000
5	Primer Spesifik gyr B Untuk Proses Amplifikasi DNA Mycobacterium tuberculosis Secara Metode Lamp	Vivi Lisdawati, Satker : Pusat 1 (PBTDK)	IDP000043906	24 Nov 2016	Rp 3.000.000
JUMLAH					Rp 14.075.000

Lampiran 16

Daftar Transfer Masuk

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

Daftar Rincian Transfer Masuk
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Penerima	Satker Pengirim	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer masuk
A	KANTOR PUSAT BPKK				
1	KANTOR PUSAT BPKK	BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN	Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	248.700.000 (248.700.000)	-
2	KANTOR PUSAT BPKK	SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	571.649.130 (571.649.130)	-
Total transfer masuk pada Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan					-
Total transfer masuk pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan					-

Lampiran 17

Daftar Transfer Keluar

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

Daftar Rincian Transfer Keluar
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer keluar
A KANTOR PUSAT BKPK					
1	KANTOR PUSAT BKPK	BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN	Barang Konsumsi	6.184.814.879	6.184.814.879
			Persediaan Lainnya	1.088.042.913	1.088.042.913
2	KANTOR PUSAT BKPK	BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN	Peralatan dan Mesin	171.323.060.601	70.233.870.572
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(101.089.190.029)	
			Gedung dan Bangunan	59.490.868.251	51.974.794.914
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.516.073.337)	
3	KANTOR PUSAT BKPK	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL	Gedung dan Bangunan	27.155.198.000	23.046.167.494
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.109.030.506)	
4	KANTOR PUSAT BKPK	DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI	Paten	8.575.000	6.783.750
			Akumulasi Amortisasi Paten	(1.791.250)	
5	KANTOR PUSAT BKPK	SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	Peralatan dan Mesin	42.267.800	-
			Akum. Penyusutan Peralatan	(42.267.800)	
6	KANTOR PUSAT BKPK	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARNEGARA	Peralatan dan Mesin	18.364.500	3.443.340
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.921.160)	
7	KANTOR PUSAT BKPK	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA	Peralatan dan Mesin	213.153.000	142.932.560
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(70.220.440)	
8	KANTOR PUSAT BKPK	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANDA ACEH	Peralatan dan Mesin	80.835.000	40.898.150
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(39.936.850)	
9	KANTOR PUSAT BKPK	RUMAH SAKIT PENYAKIT INFENSI PROF.DR.SULANTI SAROSO	Peralatan dan Mesin	269.329.230	-
			Akum. Penyusutan Peralatan	(269.329.230)	
10	KANTOR PUSAT BKPK	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	Peralatan dan Mesin	3.013.650.000	2.109.555.000
			Akum. Penyusutan Peralatan	(904.095.000)	
Total transfer keluar pada Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan					154.831.303.572
B B2P2VRP Salatiga					
1	B2P2VRP Salatiga	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	Barang Konsumsi	1.997.478.263	1.997.478.263
			Bahan untuk Pemeliharaan	264.624	264.624
			Persediaan Lainnya	102.631.200	102.631.200
			Peralatan dan Mesin	60.542.746.907	10.640.408.308
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(49.902.338.599)	
			Gedung dan Bangunan	20.601.002.410	17.130.961.286
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.470.041.124)	
			Jalan dan Jembatan	207.777.000	-
			Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(207.777.000)	
			Irigasi	346.807.000	235.417.535
			Akum. Penyusutan Irigasi	(111.389.465)	
			Jaringan	193.614.300	157.311.615
			Akum. Penyusutan Jaringan	(36.302.685)	
			Aset Tetap Lainnya	757.123.167	757.123.167
			Hak Cipta	4.400.000	3.994.242
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(405.758)	
			Paten	3.000.000	1.875.000
			Akumulasi Amortisasi Paten	(1.125.000)	
			Software	1.411.880.167	2.750.000
			Akumulasi Amortisasi Software	(1.409.130.167)	

Daftar Rincian Transfer Keluar
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer keluar
			<i>Belanja pegawai yang masih harus dibayar</i>	(2.350.000)	(2.350.000)
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(1.564.640)	(1.564.640)
	Total transfer keluar pada B2P2VRP Salatiga				31.026.300.600
C	Balai Litbangkes Magelang				
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MAGELANG	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAGELANG	Barang Konsumsi	272.619.140	272.619.140
			Bahan untuk Pemeliharaan	3.873.850	3.873.850
			Persediaan Lainnya	41.850.000	41.850.000
			Tanah	6.041.700.000	6.041.700.000
			Peralatan dan Mesin	31.750.496.542	17.362.403.411
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.388.093.131)	
			Gedung dan Bangunan	10.260.105.398	9.234.654.635
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.025.450.763)	
			Irigasi	1.024.078.000	832.726.457
			Akum. Penyusutan Irigasi	(191.351.543)	
			Jaringan	142.245.295	109.420.053
			Akum. Penyusutan Jaringan	(32.825.242)	
			Aset Tetap Lainnya	308.952.740	308.952.740
			Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.133.600	119.133.600
			Hak Cipta	2.100.000	2.000.121
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(99.879)	
			Software	113.270.000	-
			Akumulasi Amortisasi Software	(113.270.000)	
			Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.015.934.371	72.174.556
			Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1.943.759.815)	
			Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	43.645.000	-
			Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(43.645.000)	
			<i>Belanja pegawai yang masih harus dibayar</i>	(3.646.000)	(3.646.000)
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(158.145)	(158.145)
	Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Magelang				34.397.704.418
D	Balai Litbangkes Papua				
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PAPUA	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA	Barang Konsumsi	270.854.985	270.854.985
			Bahan untuk Pemeliharaan	38.907.271	38.907.271
			Persediaan Lainnya	31.762.056	31.762.056
			Tanah	20.610.000.000	20.610.000.000
			Peralatan dan Mesin	58.124.606.452	16.861.189.211
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.263.417.241)	

Daftar Rincian Transfer Keluar
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer keluar
			Gedung dan Bangunan	66.753.726.772	64.751.114.968
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.002.611.804)	
			Jalan dan Jembatan	2.127.744.000	1.841.297.880
			Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(286.446.120)	
			Jaringan	3.674.817.786	3.619.761.374
			Akum. Penyusutan Jaringan	(55.056.412)	
			Aset Tetap Lainnya	285.285.000	285.285.000
			Hak Cipta	1.000.000	948.556
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(51.444)	
			Software	226.987.999	-
			Akumulasi Amortisasi Software	(226.987.999)	
			Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	203.616.500	3.365.000
			Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(200.251.500)	
			Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	135.654.999	-
			Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(135.654.999)	
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(76.252.266)	(76.252.266)
	Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Papua				108.238.234.035
E	Balai Litbangkes Baturaja				
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BATURAJA	LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATURAJA	Barang Konsumsi	133.053.816	133.053.816
			Bahan untuk Pemeliharaan	2.442.500	2.442.500
			Persediaan Lainnya	20.925.000	20.925.000
			Tanah	14.959.921.000	14.959.921.000
			Peralatan dan Mesin	13.205.869.243	5.006.115.811
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.199.753.432)	
			Gedung dan Bangunan	18.391.154.387	16.093.940.410
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.297.213.977)	
			Jalan dan Jembatan	224.076.000	-
			Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(224.076.000)	
			Irigasi	373.681.000	302.218.468
			Akum. Penyusutan Irigasi	(71.462.532)	
			Jaringan	279.639.205	243.158.645
			Akum. Penyusutan Jaringan	(36.480.560)	
			Aset Tetap Lainnya	19.786.800	19.786.800
			Hak Cipta	200.000	192.855
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(7.145)	
			<i>Belanja pegawai yang masih harus dibayar</i>	(1.719.388)	(1.719.388)
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(28.350.168)	(28.350.168)
	Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Baturaja				36.751.685.749

Daftar Rincian Transfer Keluar
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer keluar
F Balai Litbangkes Banjarnegara					
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BANJARNEGARA	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARNEGARA	<i>Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)</i>	10.079.242	10.079.242
			Barang Konsumsi	508.585.067	508.585.067
			Bahan untuk Pemeliharaan	108.000	108.000
			Persediaan Lainnya	41.850.000	41.850.000
			Tanah	5.661.461.600	5.661.461.600
			Peralatan dan Mesin	18.440.346.604	6.206.722.835
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.233.623.769)	
			Gedung dan Bangunan	9.985.187.665	8.910.864.748
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.074.322.917)	
			Jalan dan Jembatan	204.108.600	71.438.010
			Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(132.670.590)	
			Aset Tetap Lainnya	121.589.635	121.589.635
			Hak Cipta	1.000.000	944.849
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(55.151)	
			<i>Belanja pegawai yang masih harus dibayar</i>	(4.520.250)	(4.520.250)
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(343.000)	(343.000)
	Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Banjarnegara				21.528.780.736
G Balai Litbangkes Tanahbumbu					
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TANAH BUMBU	LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TANAH BUMBU	Tanah	5.879.663.000	5.879.663.000
			Peralatan dan Mesin	12.864.567.364	4.100.568.177
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.763.999.187)	
			Gedung dan Bangunan	10.721.799.825	9.846.135.780
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(875.664.045)	
			Jalan dan Jembatan	166.283.000	10.709.400
			Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(155.573.600)	
			Irigasi	126.352.000	91.177.969
			Akum. Penyusutan Irigasi	(35.174.031)	
			Jaringan	466.465.680	286.339.146
			Akum. Penyusutan Jaringan	(180.126.534)	
			Aset Tetap Lainnya	78.675.000	78.675.000
			Hak Cipta	700.000	664.852
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(35.148)	
			Software	65.000.000	-
			Akumulasi Amortisasi Software	(65.000.000)	
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(40.303.488)	(40.303.488)
	Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Tanahbumbu				20.253.629.836

Daftar Rincian Transfer Keluar
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer keluar		
H Balai Litbangkes Donggala							
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DONGGALA	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA	Barang Konsumsi	70.582.000	70.582.000		
			Tanah	824.762.000	824.762.000		
			Peralatan dan Mesin	19.596.051.546	6.226.223.178		
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.369.828.368)			
			Gedung dan Bangunan	17.130.950.550	14.969.247.562		
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.161.702.988)			
			Jalan dan Jembatan	750.933.000	187.733.250		
			Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(563.199.750)			
			Irigasi	687.233.000	567.790.112		
			Akum. Penyusutan Irigasi	(119.442.888)			
			Jaringan	413.711.500	281.293.141		
			Akum. Penyusutan Jaringan	(132.418.359)			
			Aset Tetap Lainnya	355.442.465	355.442.465		
			Hak Cipta	3.000.000	2.841.674		
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(158.326)			
			Software	108.700.000	-		
			Akumulasi Amortisasi Software	(108.700.000)			
			Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	348.863.500	-		
			Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(348.863.500)			
Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Donggala					23.485.915.382		
I Balai Litbangkes Aceh							
1	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ACEH	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANDA ACEH	Barang Konsumsi	3.162.016.898	3.162.016.898		
			Persediaan Lainnya	267.765.000	267.765.000		
			Tanah	1.639.450.000	1.639.450.000		
			Peralatan dan Mesin	28.861.813.875	10.370.170.438		
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.491.643.437)			
			Gedung dan Bangunan	12.125.643.300	10.695.715.296		
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.429.928.004)			
			Irigasi	273.406.000	127.802.300		
			Akum. Penyusutan Irigasi	(145.603.700)			
			Jaringan	244.700.000	121.875.000		
			Akum. Penyusutan Jaringan	(122.825.000)			
			Aset Tetap Lainnya	257.187.600	257.187.600		
			Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.700.000	13.700.000		
			Hak Cipta	200.000	191.426		
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(8.574)			
			Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	616.386.263	-		
			Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(616.386.263)			
			<i>Belanja barang yang masih harus dibayar</i>	(1.023.500)	(1.023.500)		
Total transfer keluar pada Balai Litbangkes Aceh					26.654.850.458		

Daftar Rincian Transfer Keluar
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Barang/ Aset	Nilai	Nilai Bersih transfer keluar
J Loka Litbangkes Pangandaran					
1	LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PANGANDARAN	LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PANGANDARAN	Barang Konsumsi	743.017.822	743.017.822
			Bahan untuk Pemeliharaan	15.201.400	15.201.400
			Persediaan Lainnya	20.925.000	20.925.000
			Tanah	9.026.787.000	9.026.787.000
			Peralatan dan Mesin	11.986.845.298	5.835.241.150
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.151.604.148)	
			Gedung dan Bangunan	14.635.417.842	13.518.599.642
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.116.818.200)	
			Irigasi	20.417.000	16.075.082
			Akum. Penyusutan Irigasi	(4.341.918)	
			Aset Tetap Lainnya	304.214.666	304.214.666
			Konstruksi Dalam Pengerjaan	404.436.000	404.436.000
			Hak Cipta	1.000.000	941.413
			Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(58.587)	
Total transfer keluar pada Loka Litbangkes Pangandaran					29.885.439.175
K Loka Litbangkes Waikabubak					
1	LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN WAIKABUBAK	LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK	Barang Konsumsi	21.052.500	21.052.500
			Tanah	7.212.500.000	7.212.500.000
			Peralatan dan Mesin	15.692.960.030	10.572.304.561
			Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.120.655.469)	
			Gedung dan Bangunan	17.323.225.132	16.783.277.494
			Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(539.947.638)	
			Irigasi	52.098.000	39.839.640
			Akum. Penyusutan Irigasi	(12.258.360)	
			Jaringan	302.842.100	115.228.692
			Akum. Penyusutan Jaringan	(187.613.408)	
			Aset Tetap Lainnya	78.911.728	78.911.728
			Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.400.000	58.400.000
Total transfer keluar pada Loka Litbangkes Waikabubak					34.881.514.615
Total transfer keluar pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan					521.935.358.576

Lampiran 18

Daftar Pengesahan Hibah

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

Rincian Transaksi Pengesahan Hibah dan Saldo Kas Lainnya di KL dari Hibah
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	No Register	Saldo Awal Kas Lainnya di KL dari Hibah	Pengesahan Pendapatan 2024	Belum Disahkan		Pengesahan Belanja 2024	Pengembalian SP4HL	Saldo Akhir Kas Lainnya di KL dari Hibah
							Nilai	Keterangan			
					-	896.895.200	-		896.895.200	-	-
KANTOR PUSAT BKPK (SEKRETARIAT BKPK)											
1	UNICEF	Jasa	Luar Negeri	2VKG7LGA	-	358.495.200	-		358.495.200	-	-
2	TONY BLAIR INSTITUTE	Jasa	Luar Negeri	2B469RSA		538.400.000			538.400.000		
KANTOR PUSAT BKPK (PUSJAK UK)					-	-	-		-	-	-
KANTOR PUSAT BKPK (PUSJAK SKK DAN SDK)					-	-	-		-	-	-
KANTOR PUSAT BKPK (PUSJAK PDK)					-	62.327.001.274	-		61.256.079.384	277.321.490	793.600.400
1	Thinkwell Institute	Jasa	Luar Negeri	2RKPJM2A	-	10.809.605.165			10.809.605.165		-
2	UNDP	Jasa	Luar Negeri	2EQNNKYA	-	248.072.645			248.072.645		-
3	USAID	Jasa	Luar Negeri	2MKPQYFA	-	44.846.142.120			44.846.142.120		-
4	USAID	Jasa	Luar Negeri	2MKPQYFA	-	3.385.738.944			3.385.738.944		-
5	WHO	Uang	Luar Negeri	22ZGN5FA		3.037.442.400			1.966.520.510	277.321.490	793.600.400
KANTOR PUSAT BKPK (PUSJAK KGTK)					-	9.594.046.773	-		9.594.046.773	-	-
1	WHO	Jasa	Luar Negeri	22ZGN5FA	-	1.410.000.000			1.410.000.000	-	-
2	TONY BLAIR INSTITUTE	Jasa	Luar Negeri	2B469RSA		2.051.200.000			2.051.200.000		
3	USAID	Jasa	Luar Negeri	2MKPQYFA		6.132.846.773			6.132.846.773		
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN					-	72.817.943.247	-		72.237.757.357	277.321.490	793.600.400

Lampiran 19

Laporan Kinerja

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>

Laporan Kinerja
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024

No	Kode Kegiatan	KRO/RO	Uraian	Belanja			Output			Ket
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
1	6804	AEA001	Koordinasi Pengembangan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19)	2.962.400.000	2.852.677.442	96,30%	2	2,00	kegiatan	Non PN
2	6804	AEA002	Pengembangan Grouper INA CBG (PK-33)	1.489.425.000	1.300.437.355	87,31%	1	1,00	kegiatan	Non PN
3	6804	AEA003	Audi Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)	551.490.000	379.504.351	68,81%	1	1,00	kegiatan	Non PN
4	6804	AEA004	Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PK-20)	539.013.000	346.841.380	64,35%	1	1,00	kegiatan	Non PN
5	6804	AEA005	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1.455.376.000	1.268.823.163	87,18%	1	1,00	kegiatan	Non PN
6	6804	AEA006	Konsolidasi Penyusunan National Health Account (PK-17)	3.717.051.000	3.592.595.110	96,65%	2	2,00	kegiatan	Non PN
7	6804	AEA007	Penguanan Pelaksanaan Health Account (PHA/DHA) di Daerah (PK-17)	1.854.384.000	1.803.704.345	97,27%	1	1,00	kegiatan	Non PN
8	6804	AEF001	Advokasi Pembiayaan Kesehatan kepada Daerah untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	3.587.422.000	3.085.595.731	86,01%	6000	6000,00	orang	Non PN
9	6804	DCM001	Pelatihan Koding bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program JKN (PK-33)	6.003.295.000	5.895.209.782	98,20%	550	550,00	Orang	Non PN
10	6804	FAE001	Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	74.865.000	74.861.809	100,00%	1	1,00	Laporan	Non PN
11	6833	ABG001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Layanan Primer (LP-1)	36.027.000	28.863.000	80,11%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
12	6833	ABG002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Labkesmas (LP-2)	14.440.000	3.913.000	27,10%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
13	6833	ABG003	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Jejaring Layanan Rujukan (LR-11)	454.566.000	315.353.276	69,37%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
14	6833	ABG004	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Transformasi RS Vertikal (LR-12)	634.154.000	493.131.969	77,76%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
15	6833	ABG005	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Stunting (LP-4)	1.351.922.000	1.159.572.217	85,77%	2	2,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
16	6833	ABG006	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Imunisasi (LP-5)	174.180.000	82.586.676	47,41%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
17	6833	ABG007	Rekomendasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (LP-9)	1.023.794.000	998.450.054	97,52%	2	2,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
18	6833	ABG008	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Promosi Kesehatan dan PTM (LP-10)	590.573.000	523.030.277	88,56%	2	2,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
19	6833	ABG009	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontingenzi Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	3.379.882.000	2.828.898.560	83,70%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
20	6833	ABG010	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Keracunan	279.340.000	259.461.540	92,88%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
21	6833	AEA001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	5.191.543.000	4.153.962.564	80,01%	1	1,00	kegiatan	Non PN
22	6833	AEA002	Manajemen Persiapan Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) (LP-4)	7.999.119.000	839.700.710	10,50%	1	1,00	kegiatan	Non PN
23	6833	PBG001	Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (LP-4)	214.997.291.000	182.029.349.516	84,67%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	PN
24	6833	PBG002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 Melalui Uji Klinik Vaksin Merah Putih (Inavac) (RF-14)	21.201.337.000	11.871.984.861	56,00%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	PN
25	6834	ABG001	Rekomendasi kebijakan pemenuhan kebutuhan 40 obat esensial produksi dalam negeri (RF-13)	954.304.000	866.199.762	90,77%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
26	6834	ABG002	Rekomendasi kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Alat Kesehatan (RF-15)	638.477.000	628.205.207	98,39%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
27	6834	ABG005	Rekomendasi Kebijakan terkait Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	526.302.000	360.797.800	68,55%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
28	6834	ABG006	Rekomendasi Kebijakan Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Medis (SDM-21)	731.381.000	703.048.293	96,13%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
29	6834	ABG007	Rekomendasi Kebijakan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM 23)	671.960.000	658.136.930	97,94%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN
30	6834	ABG011	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontingenzi Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (LP-2)	4.361.331.000	3.722.944.719	85,36%	1	1,00	RekomendasiKe bijakan	Non PN

Laporan Kinerja
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024

No	Kode Kegiatan	KRO/RO	Uraian	Belanja			Output			Ket
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
31	6834	ABG031	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (SDM-23)	404.449.000	387.791.500	95,88%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
32	6834	ABG032	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Alat Kesehatan (RF-15)	557.840.000	462.869.709	82,98%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
33	6834	ABG033	Rekomendasi kebijakan Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Layanan Kefarmasian	1.011.721.000	993.374.459	98,19%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
34	6834	AEA002	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	5.443.047.000	3.996.087.690	73,42%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
35	6835	ABG003	Rekomendasi Kebijakan Dewan Pertimbangan Klinis	413.105.000	344.950.756	83,50%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
36	6835	ABG004	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat JKN (PK-18)	1.268.550.000	1.260.169.673	99,34%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
37	6835	ABG009	Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah (PK-20)	1.996.861.000	1.889.037.754	94,60%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
38	6835	AEA001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka Pencapaian Pembangunan Kesehatan	1.329.297.000	1.227.979.607	92,38%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
39	6835	PBG001	Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19)	558.508.000	409.089.405	73,25%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	PN
40	6835	PBG002	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan National Health Account (NHA) (PK-17)	186.810.000	111.899.328	59,90%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	PN
41	6835	PBG003	Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	665.432.000	529.542.669	79,58%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	PN
42	6835	PBG004	Rekomendasi Kebijakan Utilization Review dalam Pengendalian Kuratif dalam JKN (PK-18)	700.680.000	595.720.804	85,02%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	PN
43	6835	PBG005	Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK-18)	1.985.464.000	1.864.634.469	93,91%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	PN
44	6836	ABG001	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Kesepakatan/Kebijakan/Inisiatif Kesehatan Global yang Mendukung Transformasi Kesehatan Nasional (HS-32)	323.632.000	244.175.880	75,45%	2	2,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
45	6836	ABG017	Rekomendasi Kebijakan Perkembangan Nutrigenomic di Indonesia (TK 25)	299.370.000	117.310.000	39,19%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
46	6836	ABG019	Rekomendasi Kebijakan terkait Pendayagunaan Dokter Spesialis WNI (SDM-22)	240.380.000	87.008.000	36,20%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
47	6836	ABG022	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama Regional untuk Transformasi Kesehatan (HS 29)	44.720.000	41.285.292	92,32%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
48	6836	ABG023	Rekomendasi Kebijakan Operasionalisasi ACPHEED dan ABVC di Indonesia (HS 32)	308.382.000	261.322.878	84,74%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
49	6836	ABG024	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontingenzi Bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (HS 31)	1.601.630.000	1.480.999.295	92,47%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
50	6836	ABG025	Rekomendasi kebijakan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (HS 32)	392.750.000	382.669.170	97,43%	3	3,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
51	6836	ABG026	Rekomendasi kebijakan Evaluasi implementasi platform Satu Sehat (TK 31)	52.480.000	49.500.000	94,32%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
52	6836	ABG027	Rekomendasi Kebijakan Teknologi WGS dan layanan genomik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (TK 25)	366.695.000	263.595.300	71,88%	2	2,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
53	6836	ABG029	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan kerja sama bilateral untuk peningkatan layanan kesehatan dan inovasi (LR-12)	169.140.000	114.703.000	67,82%	1	1,00	RekomendasiKebijakan	Non PN
54	6836	AEA001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	6.622.477.000	4.363.726.245	65,89%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
55	6836	AEC003	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)	1.698.925.000	1.614.094.707	95,01%	4	4,00	Dokumen	Non PN
56	6836	AEC005	Dokumen Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS-32)	1.162.798.000	1.037.248.707	89,20%	8	8,00	Dokumen	Non PN
57	6836	AEC006	Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK-25)	666.884.000	538.505.864	80,75%	4	4,00	Dokumen	Non PN
58	6836	AEC007	Blueprint Pengelolaan Kerja sama Internasional (HS-32)	700.510.000	511.014.200	72,95%	1	1,00	Dokumen	Non PN
59	6836	AEC008	Jejaring Internasional Health Resiliency Rapid Response and Recovery Kedaruratan Kesehatan (HS-32)	1.228.508.000	1.087.457.776	88,52%	10	10,00	Kesepakatan	Non PN

Laporan Kinerja
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024

No	Kode Kegiatan	KRO/RO	Uraian	Belanja			Output			Ket
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
60	6836	AEC009	Dokumen Kerjasama Kesehatan Global dan Teknologi Terkait Biomedical Genome Science Initiative (TK 25)	1.324.559.000	749.455.746	56,58%	1	1,00	Dokumen	Non PN
61	6836	AEC011	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF-14)	717.830.000	633.203.926	88,21%	6	6,00	Dokumen	Non PN
62	6836	AEC012	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF-14)	951.333.000	825.222.479	86,74%	8	8,00	Dokumen	Non PN
63	6836	AEC013	Operasionalisasi ACPHEED (HS29)	617.800.000	583.639.998	94,47%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
64	6836	AEC014	Kontribusi Indonesia (HS 32)	16.224.000.000	16.224.000.000	100,00%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
65	6836	AEG001	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS 32)	12.760.380.000	11.096.900.353	86,96%	8	8,00	Kegiatan	Non PN
66	6836	AEG002	Pertemuan Joint Working Group (HS 32)	15.295.000	10.990.480	71,86%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
67	6836	AEG003	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	11.955.600.000	11.866.486.111	99,25%	40	40,00	Kegiatan	Non PN
68	6836	AEH001	Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri (RF 15)	484.202.000	335.859.728	69,36%	1	1,00	Kegiatan	Non PN
69	6837	ABG001	Analisis Situasi Kesehatan	9.109.766.000	8.633.948.668	94,78%	1	1,00	Rekomendasi Kebijakan	Non PN
70	6837	AEA001	Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	4.798.950.000	4.501.860.446	93,81%	1	1,00	kegiatan	Non PN
71	6837	AEA002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2.624.460.000	2.368.859.369	90,26%	1	1,00	kegiatan	Non PN
72	6797	CAN951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.515.678.000	2.457.487.533	97,69%	25	25,00	Unit	Non PN
73	6797	CBT971	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	657.950.000	657.261.650	99,90%	2	2,00	Unit	Non PN
74	6797	EBA956	Layanan BMN	960.881.000	881.253.348	91,71%	8	8,00	Layanan	Non PN
75	6797	EBA957	Layanan Hukum	1.127.498.000	916.245.660	81,26%	1	1,00	Layanan	Non PN
76	6797	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.686.074.000	2.461.865.517	91,65%	7	7,00	Layanan	Non PN
77	6797	EBA959	Layanan Protokoler	2.706.017.000	2.358.102.500	87,14%	1	1,00	Layanan	Non PN
78	6797	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	866.403.000	810.625.136	93,56%	1	1,00	Layanan	Non PN
79	6797	EBA962	Layanan Umum	1.007.493.000	977.517.015	97,02%	4	4,00	Layanan	Non PN
80	6797	EBA963	Layanan Data dan Informasi	653.048.000	588.726.608	90,15%	4	4,00	Layanan	Non PN
81	6797	EBA969	Layanan Bantuan Hukum	202.634.000	153.904.753	75,95%	10	10,00	Layanan	Non PN
82	6797	EBA994	Layanan Perkantoran	52.342.320.000	51.940.167.629	99,23%	5	5,00	Layanan	Non PN
83	6797	EBB951	Layanan Sarana Internal	4.252.815.000	4.248.144.273	99,89%	26	26,00	Unit	Non PN
84	6797	EBB971	Layanan Prasarana Internal	2.131.223.000	2.091.830.868	98,15%	1	1,00	Unit	Non PN
85	6797	EBC954	Layanan Manajemen SDM	5.487.187.000	4.717.292.695	85,97%	680	680,00	Orang	Non PN
86	6797	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.766.639.000	2.485.357.056	89,83%	11	11,00	Dokumen	Non PN
87	6797	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.313.500.000	1.259.322.457	95,88%	11	11,00	Dokumen	Non PN
88	6797	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	1.383.242.000	1.296.018.561	93,69%	18	18,00	Dokumen	Non PN
89	6797	EBD961	Layanan Reformasi Kinerja	171.906.000	121.612.325	70,74%	2	2,00	Dokumen	Non PN
90	6797	EBD974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	244.401.000	227.896.839	93,25%	9	9,00	Dokumen	Non PN

Lampiran 20

Surat Keputusan UAPPA/B-E1 BKPK TA 2024

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
☎️ (021) 4261088 (hunting)
🌐 <https://badankebijakan.kemkes.go.id>



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29. Jakarta 10560
Telepon : (021) 4261088 Faksimile : (021) 4243933
Laman : <https://www.litbang.kemkes.go.id> ; Surat Elektronik : sekretariat.bkpk@kemkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/09/2024

TENTANG

**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-1
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka setiap unit utama perlu membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon-1 (UAPPA/B E-1);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2137);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Atas Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-1 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Susunan Keanggotaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon-1 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut UAPPA/B E-1 BKPK yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

2. Koordinator : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Bayu Ari Bowo, SE., M.Ak
 - b. Ardhy Pramono, SE
 - c. Andri Kusuma, SE, MM
 - d. Cahyo Widodo, S.E
 - e. Ngatimin, S.Sos
 - f. Erna, A.Md
 - g. Fara Maulina, S.AP
 - h. Ina Savoya Nova, SE,.MM
 - i. Anwar Sidiq, A.Md
 - j. Asih Budiaستuti, SE

KEDUA : UAPPA/B E-1 BKPK memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
 - c. memberikan arahan terhadap seluruh pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
2. Koordinator:
 - a. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap laporan keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran/Tahunan (LBPP-EIS/T) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan.
3. Anggota:
 - a. menyusun laporan keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - c. membuat Daftar Barang Pembantu Pengguna – Eselon I (DBPW-E I);
 - d. melakukan pembukuan;

- e. melakukan pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
- f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu pengguna Eselon I Semesteran/Tahunan (LBPP-EIS/T) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- g. menyusun Laporan Barang Pembantu pengguna Eselon I Semesteran/Tahunan (LBPP-EIS/T) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- h. melakukan pengamanan dan pengarsipan dokumen Barang Milik Negara (BMN).

- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan UAPPA/B E-1 BKPK dibebankan pada anggaran DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/40/2023 tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA